

**Pengaruh Kompetisi Politik, Belanja Daerah, Dan
Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Publikasi Laporan
Keuangan Dalam *Website* Pemerintah Daerah
(Studi Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2022)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S1**

Program Studi S1 Akuntansi



Disusun Oleh:

Sherina Asri Rosita (31402000138)

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**Pengaruh Kompetisi Politik, Belanja Daerah, Dan
Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Publikasi Laporan
Keuangan Dalam *Website* Pemerintah Daerah**

**(Studi Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2022)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S1**

Program Studi S1 Akuntansi



Sherina Asri Rosita (31402000138)

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PENGARUH KOMPETISI POLITIK, BELANJA DAERAH, DAN
UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PUBLIKASI LAPORAN
KEUANGAN DALAM *WEBSITE* PEMERINTAH DAERAH**

**(STUDI PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2022)**



Disusun Oleh:

Sherina Asri Rosita

31402000138

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan ke hadapan sidang panitia ujian skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 10 Juli 2024

Hendri Setyawan, SE., MPA

NIK. 211406019

**PENGARUH KOMPETISI POLITIK, BELANJA DAERAH, DAN
UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PUBLIKASI LAPORAN
KEUANGAN DALAM WEBSITE PEMERINTAH DAERAH
(STUDI PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2022)**

Disusun oleh:

Sherina Asri Rosita

31402000138

Telah di pertahankan didepan penguji

Pada tanggal 25 Juli 2024

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing

Hendri Setyawan, SE., MPA

NIDN. 0621018204

Penguji 1

Dr. Sri Anik, SE., M.Si

NIDN. 0604086802

Penguji 2

Sutapa, SE., M.Si., Akt

NIDN. 0601057001

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi Tanggal 25 Juli 2024

Ketua Program Studi

Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP

NIDN. 0611088001

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Sherina Asri Rosita

NIM : 31402000138

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : S1 Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kompetisi Politik, Belanja Daerah, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Publikasi Laporan Keuangan Dalam Website Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022)”** merupakan hasil karya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiarisme atau unsur duplikasi dari karya milik orang lain. Pendapat orang lain yang terdapat dalam usulan penelitian skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiasi dari karya tulis milik orang lain.

Semarang, 27 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Sherina Asri Rosita

NIM. 31402000138

HALAMAN DAN MOTTO PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya, bersama kesulitan ada kemudahan. Semangat untuk menyelesaikan satu hal, terus bekerja keras untuk yang lain. Hanya kepada Allah SWT engkau berharap”

(Terinspirasi dari makna Quran Surah. Al-Insyiraah : 6-7)

Do not ponder over what the world need. Reflect about the activities or pursuits that ignite your passion and bring you a sense of vitality, and then actively engage in those endeavours. The world requires individuals who are really alive.

(Harold Whitman)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, persembahan ini adalah bagian karya tulis yang paling indah. Saya memberikan skripsi ini khusus kepada Tuhan semesta alam, Allah SWT, yang telah membantu saya sampai di sini dan menyelesaikannya tepat waktu. Saya sangat berterima kasih kepada orang tua saya, khususnya ibu saya tercinta, Almarhumah Ibu Suatmiyati, yang telah mendoakan saya sampai saya berada di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan ayah karea telah membawa saya sampai pada tahapan ini. Persembahan paling tulus saya berikan kepada orangtua melalui penempuhan gelar ini. Saya berterima kasih kepada diri saya sendiri karena telah kuat, yang tidak pernah memutuskan untuk menyerah pada tingkat kesulitan yang terkait dengan proses pembuatan skripsi ini. Saya juga dimotivasi oleh adik dan kakak saya untuk menyelesaikan tulisan skripsi ini, bapak dan ibu dosen, yang juga dari dosen pembimbing, segenap dosen S1 Akuntansi dan telah membantu dan membimbing saya sewaktu menjalani studi hingga akhir penyusunan skripsi ini.

ABSTRAK

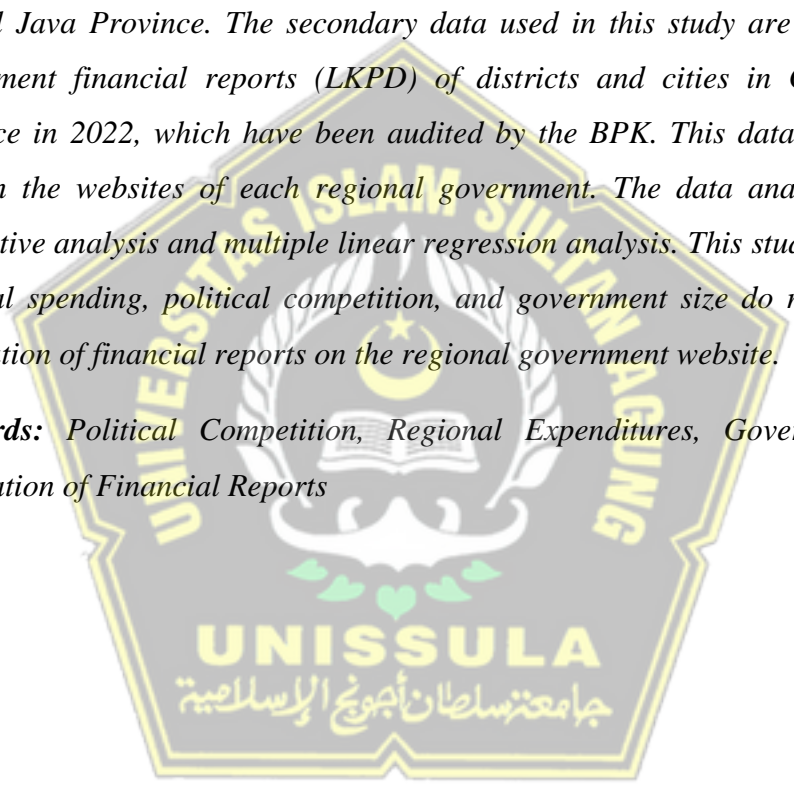
Studi jenis kuantitatif ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris untuk menjabarkan maupun mendeskripsikan mengenai pengaruh kompetisi politik, belanja daerah, dan ukuran pemerintah daerah terhadap publikasi laporan keuangan dalam website pemerintah daerah. Penelitian ini akan melibatkan seluruh pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, dan sampelnya terdiri dari 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022, yang telah diaudit oleh BPK. Data ini dipublikasikan melalui situs *website* pemerintah daerah masing-masing. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menunjukkan bahwa belanja daerah, kompetisi politik, dan ukuran pemerintah tidak mempengaruhi publikasi laporan keuangan di situs *website* pemerintah daerah.

Kata Kunci: Kompetisi Politik, Belanja Daerah, Ukuran Pemerintah, Publikasi Laporan Keuangan

ABSTRACT

In This quantitative study aims to obtain empirical evidence to describe the influence of political competition, regional spending, and the size of the regional government on the publication of financial reports on the regional government website. This study will involve all district/city governments in Central Java Province in 2022. The sample selection in this study was carried out using a purposive sampling technique, and the sample consisted of 33 districts/cities in Central Java Province. The secondary data used in this study are the regional government financial reports (LKPD) of districts and cities in Central Java Province in 2022, which have been audited by the BPK. This data is published through the websites of each regional government. The data analysis used is descriptive analysis and multiple linear regression analysis. This study shows that regional spending, political competition, and government size do not affect the publication of financial reports on the regional government website.

Keywords: *Political Competition, Regional Expenditures, Government Size, Publication of Financial Reports*



KATA PENGANTAR

Sungguh bersyukur atas kehadiran Allah SWT, yang merahmati dan memberi penulis kemampuan untuk menyelesaikan skripsi berjudul “Pengaruh Kompetisi Politik, Belanja Daerah, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Publikasi Laporan Keuangan Dalam Website Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022)” Banyak orang membantu penulis dalam menulis dan menyusun skripsi ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada banyak orang yang telah membantunya, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti:

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung, Prof. Dr. Heru Sulistyono, SE, M.Si. yang telah memberikan perizinan dalam penelitian,
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ph.D., Ak., CA., IFP., AWP selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Bapak Hendri Setyawan, SE., MPA. selaku dosen pembimbing skripsi atas bantuan dan bimbingan yang dia berikan selama studi penulis di Jurusan S1 Akuntansi,
4. Ibu Dr. Sri Anik, SE., M.Si. sebagai dosen penguji 1 yang sudah berkenan dan berniat menawarkan dukungan terus-menerus, penelitian, dan bimbingan dalam proses penulisan skripsi ini,
5. Bapak Sutapa, SE.,M.Si., Akt. selaku dosen penguji 2 yang telah memberikan masukan dan arahan untuk skripsi ini,
6. Bapak maupun ibu dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Ekonomi, khususnya di Jurusan S1 Akuntansi, telah banyak memberikan pengetahuan dan bantuan dalam menyelesaikan dokumen penelitian,
7. Keluarga saya Bapak Sumar Tri Cahyo, Almarhumah Ibu Suatmiyati dan kakak serta adek saya yang telah berusaha mendorong penulis dengan doa dan insentif motivasi untuk menyelesaikan tugas skripsi ini,
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan langsung dan tidak langsung kepada saya.

Penulis sadar bahwa tugas skripsi ini masih jauh dari ideal. Akibatnya, penulis berharap kritik dan saran dalam pengantar ini akan membantu menyelesaikan dan membuatnya menjadi lebih baik. Akhir kata, penulis berharap semoga tugas akhir skripsi ini mampu membantu semua orang dan memberikan manfaat secara kontribusif bagi para pembaca.

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
HALAMAN DAN MOTTO PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Pertanyaan Penelitian	10
1.4. Tujuan Penelitian	10
1.5. Manfaat Penelitian	11
BAB II	13
KAJIAN PUSTAKA	13
2.1. Landasan Teori.....	13
2.1.1. Teori Keagenan	13
2.1.2. Teori Signal.....	18
2.1.3. Pelaporan keuangan pemerintah daerah.....	24
2.1.4. Pelaporan Keuangan Pada <i>Website</i>	29
2.2. Penelitian Terdahulu	47
2.2. Hipotesis Penelitian	53
2.2.1. Pengaruh Kompetisi Politik Terhadap Publikasi Laporan Keuangan Dalam <i>Website</i> Pemerintah Daerah	53
2.2.2. Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Publikasi Laporan Keuangan Dalam <i>Website</i> Pemerintah Daerah	55
2.2.3. Pengaruh Ukuran Pemerintah Terhadap Publikasi Laporan Keuangan Dalam <i>Website</i> Pemerintah Daerah.....	57
2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis	58

BAB III.....	61
METODOLOGI PENELITIAN	61
3.1. Jenis Penelitian.....	61
3.2. Populasi dan Sampel	61
3.2.1. Populasi.....	61
3.2.2. Sampel.....	63
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	64
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	64
3.5. Operasional Variabel.....	65
3.5.1. Variabel Dependen (Y).....	65
3.5.2. Variabel Independen (X).....	66
3.6. Metode Analisis Data.....	72
3.6.1. Statistik Deskriptif	72
3.6.2. Uji Asumsi Klasik.....	72
3.6.3. Analisi Linear Berganda	74
3.6.4. Uji Goodness of Fit.....	75
3.6.5. Pengujian Hipotesis.....	76
BAB IV	77
HASIL DAN PEMBAHASAN	77
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	77
4.2. Pengujian dan Hasil Analisis data.....	78
4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif	78
4.2.2. Uji Asumsi Klasik.....	82
4.2.3. Analisis Regresi Linier Berganda	85
4.2.4. Uji Goodness of Fit.....	88
4.2.5. Pengujian Hipotesis.....	90
4.3. Pembahasan hasil penelitian	92
4.3.1. Pengaruh Kompetisi Politik terhadap Publikasi Laporan Keuangan Dalam Website Pemerintah Daerah.....	93
4.3.2. Pengaruh Belanja Daerah terhadap Publikasi Laporan Keuangan Dalam Website Pemerintah Daerah.....	96
4.3.3. Pengaruh Ukuran Pemerintah terhadap Publikasi Laporan Keuangan Dalam Website Pemerintah Daerah	98
BAB V	101
PENUTUP.....	101

5.1.	Kesimpulan	101
5.2.	Implikasi	102
5.2.1.	Implikasi Teoritis	102
5.2.2.	Implikasi Praktis	103
5.3.	Keterbatasan.....	103
5.4.	Saran	104
DAFTAR PUSTAKA.....		105



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu.....	48
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel.....	68
Tabel 4. 1 Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian	77
Tabel 4. 2 Uji Statistik Deskriptif	79
Tabel 4. 3 Hasil Uji Kolmogorov-smirnov	82
Tabel 4. 4 Hasil Uji multikolinearitas	83
Tabel 4. 5 Hasil Uji Glejser	85
Tabel 4. 6 Hasil Analisis Regresi.....	86
Tabel 4. 7 Hasil Uji F.....	88
Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien determinasi.....	90
Tabel 4. 9 Hasil Uji t.....	91



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Teoritis 60



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Website Resmi Pemda Provinsi Jawa Tengah.....	110
Lampiran 2 Indeks Aksesibilitas Publikasi Laporan Keuangan	112
Lampiran 3 Nilai Aksebilitas Publikasi Laporan Keuangan.....	113
Lampiran 4 Tabulasi Data.....	115
Lampiran 5 Hasil Output Spss	116



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia menerapkan segala macam kompleks aturan terkait otonomi daerah, yaitu suatu bentuk wewenang pemerintah daerah, provinsi, kota, dan kabupaten guna mengatur, melakukan penyusunan, serta melaksanakan dengan mandiri urusan dan kepentingan pemerintahannya tanpa keterlibatan dan dukungan dari pemerintah pusat. Wewenang yang dilimpahkan dari pemerintah pusat tersebut berimplikasi terhadap transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah. Contoh bentuk transparansi yang melekat dan terdapat pada tiap-tiap daerah, yaitu dengan membuat laporan keuangan daerah. Laporan keuangan kemudian diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK). Laporan ini kemudian diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Aspek keuangan secara sistematis yang dikelola secara transparansi dan akuntabilitas dapat berjalan dengan optimal apabila pemerintah daerah menyajikan laporan keuangannya secara relevan dan semua pihak dapat mengaksesnya. Dengan demikian agar semua pihak mudah mengakses laporan keuangan, pemerintah daerah seharusnya menyediakan wadah guna mempublikasikan laporan keuangannya secara berkala melalui platform atau media yang mudah dijangkau oleh semua golongan masyarakat tanpa terkecuali. Wadah guna mempublikasi laporan keuangan tersebut dapat melalui surat kabar, media internet, maupun majalah.

Pemerintah daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan sistem informasi yang berkembang pesat sekarang. Saat ini dalam pemerintahan pusat dan daerah telah didorong dengan adanya teknologi informasi yang memadai guna memaksimalkan pelayanan serta kebutuhan berbagai tingkatan masyarakat yang bertujuan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Pemanfaatan teknologi tersebut digunakan pemerintah sebagai sarana untuk mengungkapkan beberapa ide maupun informasi yang memiliki urgensi terkait proses keuangan melalui bagian situs resmi milik setiap pemerintah daerah yang diunggah melalui media internet. Upaya tersebut dilakukan pemerintah agar pemerintah transparan dalam kinerjanya. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa pemerintah wajib secara efektif dan efisien mengungkapkan informasi kepada masyarakat. Undang-undang ini menekankan bahwa semakin besar tuntutan untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintah (Sofyani dan Dwirama, 2019).

Pemerintah daerah mempublikasikan laporan keuangan guna memenuhi transparansi serta akuntabilitas pada penyelenggaraan dan pengelolaan laporan keuangan yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada berbagai pihak, yakni baik masyarakat, kreditor, investor, bahkan pihak-pihak terkait lainnya yang terkait dengan pengungkapan laporan keuangan tersebut. Puspita dan Martani (2013) mengatakan bahwa proses digitalisasi yang memanfaatkan teknologi dalam pengungkapan informasinya pada segala bidang organisasi disebabkan karena biaya yang relatif murah serta keberadaan teknologi

informasi dan komunikasi yang kuat, aktivitas entitas ekonomi mengalami peningkatan dan menjadi lebih mudah, yang dahulu dilaksanakan secara manual dan tradisional. Meskipun demikian, pemerintah daerah belum mampu bekerja untuk mengoptimalkan kelebihan pada *websitenya* sebagai pengungkap informasi yang berkaitan dengan pemerintahannya.

Sejauh ini, pemerintah daerah di Indonesia sudah banyak yang melakukan praktek pemanfaatan media internet sebagai alat untuk pengungkapan laporan keuangannya. Tetapi Beberapa pemerintah daerah lainnya justru belum mampu melakukan praktek pengungkapan informasi yang komprehensif mengenai laporan keuangan dan kinerjanya di situs *web* yang dimilikinya. Mereka belum mampu memanfaatkan secara maksimal untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintahannya. Tetapi terpantau media internet hanya dipilih secara sukarela oleh beberapa pemerintah daerah untuk diambil manfaatnya dalam melakukan praktek pengungkapan laporan keuangan tersebut. Alasan pemerintah daerah melakukan atau tidak melakukan pengungkapan tersebut dapat digunakan sebagai cara yang bagus untuk melaporkan keuangan secara sukarela. Hasilnya, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dapat tercipta nantinya diharapkan intensi masyarakat dapat terpenuhi atas terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang terarah.

Sofyani dan Dwirama (2019) menyatakan bahwa dengan adanya pengungkapan laporan keuangan berbasis internet maka akan meningkat juga rasa percaya masyarakat pada pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas. Tetapi fakta dilapangan menyebutkan bahwa pemerintah daerah tidak

semuanya menggunakan media internet sebagai wadah penyampaian informasi wajib ataupun sukarela. Ini karena terdapat indikasi bahwa ada faktor tertentu sehingga menyebabkan pemerintah daerah mengungkap informasi di internet atau tidak. Kemampuan pengungkapan internet secara lebih luas terbukti dimiliki daerah yang mempunyai akses internetnya dengan tingkat tinggi (Hardiningsih, 2021). Padahal seharusnya pemerintah daerah lebih bijaksana dalam menerima fakta bahwa semua pihak dapat mengakses pengungkapan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel karena termasuk bentuk pertanggungjawaban oleh pemerintah daerah kepada dan untuk masyarakat atas keuangan daerah yang dikelola.

Pemerintah daerah kurang kesadaran dan partisipasi dalam melakukan praktek transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan di situs *web* yang menandakan bahwa pemerintah daerah kurang melek dalam kemajuan teknologi dan informasi. Instruksi yang dikeluarkan melalui badan Kementerian Dalam Negeri tentang Meningkatkan Kejelasan Mengenai transparansi proses pengelolaan anggaran pada tiap daerah yang mana peraturan tersebut sebenarnya dirancang dengan kepentingan agar dapat mendorong pemerintah daerah dalam hal penyampaian transparansi dari anggaran melalui *website* pemerintahan (Masra dan Sari, 2020). Maksud dari diterbitkannya peraturan tersebut adalah agar para Gubernur mengatur semua kepala daerah di wilayah masing-masing yang belum memiliki *website* untuk berusaha segera mengembangkan inovasi teknologi guna memberikan informasi tentang pengungkapan laporan keuangan daerah tersebut. Dengan belum adanya

kesadaran penuh tentang pentingnya melakukan publikasi informasi laporan keuangan mengakibatkan kurangnya pemanfaatan penggunaan *website* untuk tujuan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan pemerintah terjadi peningkatan.

Akuntabilitas pemerintah terhadap permintaan publik atas informasi adalah suatu kontribusi yang penting terhadap pemerintah yang transparan. Oleh karena itu, publikasi laporan keuangan pada media yang keberadaannya sangat diharapkan bahwa melalui publikasi pada ranah internet yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan meningkatkan rasa percaya kelompok masyarakat terhadap transparansi maupun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut juga merupakan sebuah bentuk upaya yang dilakukan pemerintah daerah guna mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan meminimalisasi fraud seperti adanya korupsi dan penyalahgunaan jabatan yang terjadi didalam pemerintahan. Dengan menyebarluaskan laporan keuangan di internet dianggap sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah sebagai indeks yang menyatakan bahwa pemerintah telah memaksimalkan pengelolaan keuangan dengan baik.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang pelaksanaan terkait publikasi yang diupayakan oleh daerah melalui pemerintahannya yang mana mampu di pengaruhi oleh beberap hal. Saraswati et al. (2019) menunjukkan bahwa banyak faktor memengaruhi publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di internet. Dalam penelitian yang dia lakukan, dia menemukan bahwa

publikasi laporan keuangan yang tersedia secara online tidak dipengaruhi opini audit atau keberadaan situs web LPSE, tetapi dipengaruhi belanja daerah dan pendapatan per kapita. Penelitian serupa dilakukan oleh Sofyani dan Dwirama (2019), yang mana menunjukkan bahwasanya penelitian tersebut menemukan bahwa kekayaan daerah, persaingan politik, dan pendapat audit memengaruhi pelaporan pemerintah daerah di internet.

Beberapa peneliti juga telah menyelidiki publikasi laporan keuangan Indonesia. Namun, temuan penelitian masih menunjukkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan dalam hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Studi Hadianto dan Murtin (2020) menemukan bahwa unsur-unsur persaingan politik, rasio pembiayaan utang, pendapatan per kapita, kekayaan daerah, dan opini audit tidak mempengaruhi pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR) pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih et al. pada tahun berikutnya (2021) menghasilkan temuan yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Studi menunjukkan bahwa ukuran pemerintah, aksesibilitas, dan pendapat audit sangat memengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di internet. Penelitian serupa juga telah dilakukan oleh Kurniati dan Siddi (2020), Putri dan Setiawan (2022), Masra dan Sari (2020), Yunita (2021), Oktavia dan Aliyah (2022), Mariasari (2023), Puspita dan Martani (2013).

Penelitian ini merujuk pada penelitian Sofyani dan Dwirama (2019) yang didalam penelitiannya kompetisi politik, kekayaan daerah, dan pendapat audit adalah variabel independen yang digunakan.. Pembaharuan dari penelitian ini

yaitu dengan menambahkan variabel belanja daerah dan ukuran pemerintah daerah.

Penambahan variabel belanja daerah terjadi karena belanja daerah meliputi semua kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai bersih kekayaan selama periode anggaran tahun tersebut yang mana saling terkait. Oleh karena itu variabel tersebut diduga dapat mempengaruhi publikasi informasi keuangan oleh pemerintah daerah. Selain itu pemerintah akan terdorong untuk meningkatkan keterbukaan informasi keuangannya pada *website* yang dimilikinya. Belanja daerah dapat digunakan agar layanan terhadap masyarakat mengalami peningkatan. Dana yang dikeluarkan dalam rangka meningkatkan pelayanan juga bersumber dari rakyat. Oleh karena alasan tersebut, pemerintah daerah seharusnya berkewajiban dalam peningkatan transparansi sebagai wujud pertanggungjawaban atas masyarakat oleh dana yang dialirkan sebagai dana belanja daerah. Saraswati et al., (2019) menyebutkan bahwa tingginya tingkat implementasi pengeluaran daerah akan meningkatkan upaya pemerintah daerah untuk mempublikasikan laporan keuangannya secara daring. Sasaran dari kegiatan ini adalah agar masyarakat memahami besaran anggaran yang dialokasikan dalam APBD untuk memperbaiki layanan kepada masyarakat. Dengan begitu, semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan, semakin tinggi pula motivasi dari pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi keuangannya secara daring. Namun, variabel belanja daerah dalam penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil temuan dari studi lain. Yunita (2021) dan Winangsih serta Fathah (2023), dalam kedua penelitian tersebut menunjukkan

bahwa publikasi informasi keuangan pada *website* pemerintah daerah tidak dipengaruhi oleh belanja daerah. Hal ini dikarenakan belanja negara merupakan anggaran yang ditujukan untuk diimplementasikan dan dievaluasi. Jadi tidak ada pengaruh apakah informasi keuangan akan dipublikasikan atau tidak.

Sedangkan penambahan variabel ukuran pemerintah daerah dikarenakan tingkat ukuran pemerintahan akan mempengaruhi tingkat rasa ingin tahu masyarakat, yang artinya semakin besar skala pemerintahan maka akan semakin meningkat pula rasa keingintahuan publik pada aset pemerintahan yang dimiliki dan dikelola. Besar kecilnya ukuran pemerintahan diungkap pada penelitian Susiyah et al., (2018) menyatakan bahwa suatu pemerintahan dapat dinilai dengan memperhatikan jumlah keseluruhan aset yang ada. Semakin sedikit kekayaan yang dimiliki menunjukkan kecilnya pemerintahan tersebut, begitupun sebaliknya. Oleh karena pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa ukuran pemerintahan dapat direpresentasikan dari variabelnya yaitu adalah total keseluruhan aset yang dimiliki dapat diparafasakan menjadi beberapa sumber daya yang terdapat pada individu atau organisasi. Pemerintah daerah akan lebih bersikap tegas dalam pengelolaan dan perlindungan aset jika jumlah aset yang dimilikinya terus meningkat. Hal ini diharapkan dapat mendorong kinerja pemerintah daerah untuk mempublikasikan laporan keuangan pada pemerintahannya.

Dalam penelitian ini tidak menggunakan variabel kekayaan daerah karena pada hasil penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa variabel tersebut secara terus-menerus memberikan dampak positif terhadap penerbitan laporan

keuangan di platform daring pemerintah daerah, seperti yang terungkap. dalam penelitian Kurniati dan Siddi (2020), Mariasari (2023), Nurhidayati dan Rahayu (2020), Winangsih dan Fathah (2023), Aggatha et al., (2023), Lesmanawati (2019). Kemudian penelitian ini juga tidak menggunakan variabel opini audit dikarenakan dari penelitian yang telah ada sebelumnya menunjukkan hasil penelitian yang konsisten, yaitu terdapat hubungan positif antara pendapat audit dan penyebaran informasi keuangan di laman resmi pemerintah daerah yang mana hasilnya konsisten tersebut terdapat dalam penelitian Hardiningsih et al., (2021), Kurniati dan Siddi (2020), Winangsih dan Fathah (2023), Moehardiono dan Yuliati (2021), Aggatha et al., (2023), Bahrudin et al., (2019).

Studi ini mengangkat tujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai perkembangan terkini mengenai situasi pemerintahan daerah pada saat ini, dan berdasarkan atas saran penelitian terdahulu supaya dapat membuat sebuah perbandingan pelaporan keuangan pada media internet oleh pemerintah daerah berdasarkan periode waktu tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan periode pemerintahan tahun 2022. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka perlu dilakukan penelitian kembali mengenai **“Pengaruh kompetisi politik dan belanja daerah terhadap publikasi laporan keuangan dalam website pemerintah daerah (studi pada pemerintahan kabupaten/kota di provinsi jawa tengah tahun 2022)”**

1.2. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang, identifikasi, dan ruang lingkup yang ada, maka rumusan masalah dalam studi ini dirumuskan sebagai berikut

yakni untuk menganalisis dan menguji pengaruh kompetisi politik, belanja daerah, dan ukuran pemerintah terhadap publikasi laporan keuangan di situs web pemerintah daerah. Penelitian pada hal ini bertujuan guna melakukan proses menjawab apakah kompetisi politik, belanja daerah, dan ukuran pada pemerintah berpengaruh pada proses publikasi terkait adanya laporan keuangan di website pemerintahan pada daerah. Hipotesis dalam studi ini berusaha mengungkapkan bahwa ada pengaruh dari persaingan politik, belanja pada daerah, dan ukuran pemerintahan terhadap penerbitan laporan keuangan di situs web pada pemerintahan daerah.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan serangkaian panjang proses dan konteks serta permasalahan yang telah diidentifikasi, pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah berpengaruh kompetisi politik terhadap publikasi laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah?
2. Apakah berpengaruh belanja daerah terhadap publikasi laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah?
3. Apakah berpengaruh ukuran pemerintah terhadap publikasi laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah?

1.4. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, tujuan berfungsi sebagai alat pengontrol yang bisa digunakan sebagai panduan agar penelitian tersebut berlangsung sesuai harapan. Maka, berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dijabarkan, maka tujuan diadakan penelitian ini yaitu:

1. Berupaya untuk melakukan proses analisis pengaruh kompetisi politik terhadap maupun terkait publikasi laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah
2. Berupaya untuk melakukan proses analisis pengaruh belanja daerah terhadap maupun terkait publikasi laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah
3. Berupaya untuk melakukan proses analisis ukuran pemerintah terhadap maupun terkait publikasi laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah

1.5. Manfaat Penelitian

Dengan mempertimbangkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat berikut :

a. Manfaat Teoritis

Harapan dari hasil penelitian ini adalah agar dapat memberikan pemahaman dan wawasan baru tentang hubungan antara sistem kompetisi politik, belanja daerah, serta ukuran pemerintah terhadap publikasi laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah, yang mana hasil penelitian tersebut dapat memberikan informasi yang berguna dan dapat dipergunakan sebagai titik awal untuk penemuan pada penelitian-penelitian dimasa depan bagi akademisi.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah melalui jenis pemerintahan pada tiap daerah diharapkan bisa mengelola keuangan yang terdapat pada daerah yang telah diputuskan untuk beberapa tujuan tersebut sebagai sarana dalam mengatasi semua bentuk kekhawatiran yang nantinya akan timbul terkait dengan publikasi laporan keuangan dalam *website* dan digunakan dalam pengelolaan setiap risiko yang mungkin akan timbul akibat adanya kekhawatiran tersebut, sehingga akan melindungi keuangan daerah serta masyarakat.

2. Bagi Pengguna Laporan Keuangan

Bagi para pemangku kepentingan laporan keuangan yang secara khusus. Penggunaanya secara eksplisit pada masyarakat umum, hasil penelitian ini diharapkan bisa menyediakan informasi yang lugas mengenai keuangan pemerintah daerah khususnya tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam persaingan kompetisi politik dan pengelolaan belanja daerah sehingga masyarakat merasa aman dalam adanya keterbukaan informasi dan dapat mengaksesnya dimanapun tanpa terhalang oleh waktu dan tempat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan

Teori keagenan atau *Agency Theory* menggambarkan adanya konflik secara khusus dalam hubungan antara dua pihak dalam kegiatan ekonomi, yaitu agen dan prinsipal. Hubungan keagenan muncul ketika satu pihak atau lebih (prinsipal) memberikan kekuasaan kepada pihak lain (agen) untuk berupaya untuk menyediakan layanan, termasuk membuat keputusan atas nama *principal* (Putri dan Setiawan, 2022). Dalam konteks ini, pemerintah daerah adalah agennya, dan masyarakat atau publik sebagai agent memberikan otorisasi dan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan menyampaikan laporan yang jelas kepada masyarakat tentang kinerja mereka. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaporkan kinerja mereka kepada publik melalui laporan keuangan dan penilik, bersama dengan stakeholder lainnya, yang berfungsi sebagai perwakilan publik.

Teori ini bertujuan untuk mengatasi perbedaan yang signifikan dalam kepentingan yang mungkin didapati oleh principal dan agen. Untuk mencapai tujuan ini, mereka berusaha untuk memberikan informasi keuangan yang dapat membantu meningkatkan keuntungan dan juga mempertimbangkan kemungkinan kerugian (Jensen, 1976). Konflik

kepentingan dan ketidaksetaraan informasi antara agen dan prinsipal adalah masalah perbedaan yang paling umum dalam hubungan keagenan ini.

Pemerintah menyebabkan asimetri informasi dan *agency problem* karena pemerintah sendiri menyalahgunakan wewenang dan jabatan. Adanya masalah ini akan menyebabkan informasi yang diperoleh kedua belah pihak tidak seimbang. Dengan informasi yang lebih besar, pemerintah pasti akan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat. Tanpa komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, kepentingan semua pihak tidak akan dipertimbangkan. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak menerima informasi yang tepat tentang situasi sebenarnya. Akibatnya, kinerja dan keputusan yang ditetapkan pemerintah tidak dapat dipantau oleh masyarakat akan menimbulkan masalah baru lagi.

Menurut teori agensi untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, transparansi dan akuntabilitas pemerintah tentang pengelolaan kegiatan pemerintahan harus ditingkatkan (Mariasari, 2023). Pemerintah harus membuat informasi yang dilaporkan jelas dan mudah diakses agar hubungan antar pemerintah dan masyarakat dapat ditingkatkan. Yaitu dengan publikasi informasi keuangan, seperti laporan keuangan dan non-keuangan yang memanfaatkan penggunaan internet dan teknologi informasi. Meminimalkan asimetri informasi yang menyebabkan perselisihan di antara pemerintah (agent) dan masyarakat (principal) adalah hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini.

Untuk menjelaskan hubungan antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal, teori keagenan sangat penting. Ini terutama berlaku dalam hal pengelolaan informasi. Dalam hubungan ini, sering terjadi asimetri informasi, di mana masyarakat memiliki akses informasi yang lebih sedikit daripada pemerintah. Karena masyarakat merasa tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang kebijakan dan keputusan pemerintah, ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan perselisihan. Akibatnya, transparansi sangat penting untuk mengurangi asimetri informasi.

Dengan menyediakan informasi yang lebih transparan dan akurat, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses pengawasan dan evaluasi kebijakan publik. Hal ini membantu menciptakan hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang lebih adil dan damai. Menurut Jansen (1976) Meningkatkan transparansi sektor publik dapat meningkatkan partisipasi publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, untuk menekankan bahwa penggunaan teknologi digital dan platform daring dapat menjadi alat yang efektif untuk mengurangi asimetri informasi, memungkinkan penyebaran informasi yang lebih cepat dan real-time. Dengan menerapkan teori keagenan, pemerintah dapat lebih baik mengelola hubungan dengan masyarakat, memastikan bahwa kepentingan publik diperhatikan, dan mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Pemerintah dapat menggunakan teori keagenan untuk mengelola hubungan masyarakat dengan lebih baik. Untuk menghindari konflik kepentingan antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal, pengelolaan yang transparan dan akuntabel sangat penting (Mariasari, 2023). Dalam situasi seperti ini, pemerintah harus bertindak berdasarkan kepentingan umum, bukan hanya kepentingan individu tertentu. Pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang mendukung keterbukaan informasi dan partisipasi publik benar-benar memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat dengan menerapkan kebijakan seperti itu (Yulianti & Mahendrawathi, 2023). Selain itu, partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendorong masyarakat untuk lebih terlibat dalam pembangunan berkelanjutan. Metode ini dapat membangun hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang lebih harmonis di mana keduanya bekerja sama mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, teori keagenan tidak hanya berfungsi sebagai alat yang berguna untuk meningkatkan kinerja pemerintah, tetapi juga membantu mengembangkan demokrasi yang benar-benar partisipatif. Dalam hal ini, pemerintah membantu dengan memastikan bahwa suara masyarakat diwakili dan dipertimbangkan dalam keputusan yang dibuat.

Komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mengurangi asimetri informasi dan memastikan bahwa kebijakan dibuat sesuai dengan kebutuhan publik. Situasi ini terjadi ketika

pemerintah sebagai agen memiliki lebih banyak informasi daripada masyarakat sebagai prinsipal, yang dapat menyebabkan kebijakan yang tidak efektif atau bahkan merugikan (Ross, 2023). Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus membuat sistem pelaporan dan pengawasan yang transparan. Laporan berkala dan penggunaan platform digital untuk memberikan informasi tentang kebijakan dapat membantu meningkatkan keterlibatan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah dan forum publik juga penting untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dalam proses pengambilan keputusan. Metode ini memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan memperkuat legitimasi politik. Pada akhirnya, ketika teori keagenan yang baik diterapkan, pemerintah dan masyarakat akan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama-sama. Pada akhirnya, teori keagenan yang efektif dapat membantu memperkuat hubungan simbiosis antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hubungan ini, keduanya akan bekerja sama untuk mencapai tujuan melalui kerja sama yang efektif. Masyarakat merasa lebih terlibat dan percaya pada proses pengambilan keputusan ketika pemerintah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat (Marwati & Susilo, 2024). Ini menciptakan sebuah lingkungan di mana pemerintah dan masyarakat berbagi informasi dan umpan balik, yang memungkinkan perubahan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat (Putri & Gunawan, 2024). Oleh karena itu, integrasi yang efektif dari prinsip keagenan dapat membantu mencapai tujuan transparansi dan

akuntabilitas dengan lebih baik dan memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam konteks ini, penerapan teori keagenan yang kuat juga dapat meningkatkan efisiensi kebijakan publik dengan meningkatkan mekanisme untuk mengawasi dan melibatkan masyarakat. Ketika pemerintah dan masyarakat bekerja sama, ada peluang yang lebih besar untuk secara proaktif menemukan dan mengatasi masalah. Teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran penting dalam hal ini karena mereka mempermudah akses informasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Widodo & Sari, 2024). Masyarakat dapat secara aktif berkontribusi dalam proses evaluasi dan perbaikan kebijakan dengan adanya sistem pelaporan yang transparan dan mekanisme umpan balik yang efektif (Nugroho & Lestari, 2024). Tidak hanya kerja sama ini meningkatkan efektivitas kebijakan tetapi juga menumbuhkan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat umum, yang menciptakan pencapaian hubungan baik yang lebih adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, memastikan bahwa prinsip keagenan diterapkan dengan benar adalah kunci untuk menciptakan sinergi yang produktif dan keuntungan berkelanjutan bagi semua pihak.

2.1.2. Teori Signal

Teori signal atau *signalling teory* menurut Jama'an (2008) dalam Saraswati et al, (2019) menjelaskan bagaimana beberapa signal diberikan oleh perusahaan kepada pengguna laporan keuangannya, salah satunya

yaitu informasi terkait upaya manajemen dalam merealisasikan keinginan pemilik. Teori ini berprinsip bahwa semua tindakan mengandung unsur informasi.

Menurut Evans dan Patton (2019) dalam Sofyani dan Dwirama (2019), masyarakat memberikan amanah kepada pemerintah yang ingin memberikan sinyal kepada publik atau masyarakat. Maksudnya adalah untuk menampilkan secara akurat dan berkualitas tinggi berbagai informasi sukarela atau penting tentang kinerjanya, baik keuangan maupun non-keuangan di situs web pemerintah daerah. Pemerintah harus melakukan apa yang telah disebutkan dalam menjalankan amanah tersebut dan harus mampu mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat. Dalam situasi seperti ini, pemerintah selalu berusaha memberikan sinyal positif kepada masyarakat agar masyarakat dapat terus berkontribusi untuk mendukung kinerja pemerintah yang transparan, yang memungkinkan pemerintah beroperasi dengan baik.

Jika pemerintah memberikan informasi yang memadai tentang kondisi pemerintahannya, pemerintahan dapat berbeda dari pemerintahan lain. Pemerintahan yang kondisi kinerjanya baik pasti dapat memberikan informasi kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab atau promosi politik. Karena ketidaksetaraan informasi antara agent dan prinsipal, hal tersebut dapat mendorong pemerintah untuk menyampaikan hasil kinerjanya dan informasi keuangan untuk menepis asimetri informasi. Metode efektif untuk mempertanggungjawabkan informasi keuangan

kepada masyarakat adalah dengan menurunkan biaya dan menerbitkan laporan keuangan di internet.

Menggunakan jaringan internet untuk menyampaikan informasi keuangan adalah salah satu cara paling efektif untuk memberikan sinyal positif pemerintah kepada masyarakat. Akses publik ke penyelenggaraan pemerintahan dapat mengurangi asimetri informasi. Pemerintah setempat melakukan tindakan ini untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka telah melakukan apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Jika pemerintah daerah dapat mengatasi perselisihan yang disebabkan oleh asimetri informasi, hal itu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Menggunakan jaringan internet untuk menyampaikan informasi keuangan adalah salah satu cara paling efektif untuk memberikan sinyal positif pemerintah kepada masyarakat. Akses publik ke penyelenggaraan pemerintahan dapat mengurangi asimetri informasi. Pemerintah setempat melakukan tindakan ini untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka telah melakukan apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Jika pemerintah daerah dapat mengatasi perselisihan yang disebabkan oleh asimetri informasi, hal itu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Pemerintah juga telah menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi keuangan dengan membuat aplikasi dan platform digital yang memungkinkan orang mudah mengakses laporan keuangan pemerintah secara real-time. Hal ini meningkatkan akuntabilitas dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses

pengambilan keputusan publik. Sebuah studi terbaru oleh Setiawan et al. (2023), teknologi digital dalam penyebaran informasi keuangan pemerintah telah terbukti meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan hubungan antara pemerintah dan warganya. Akses yang lebih baik terhadap informasi mendorong orang untuk lebih terlibat dalam mengawasi bagaimana pemerintah bekerja dan membuat mereka lebih siap untuk memberikan kritik yang bermanfaat yang dapat membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang lebih baik. Selain itu, teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya negara dan mencegah penyalahgunaan dana publik, menurut penelitian oleh Wardani dan Fajar (2024), yang menekankan manfaat keterbukaan informasi dalam mengurangi korupsi di sektor publik.

Teknologi digital juga berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana publik. Sistem informasi berbasis teknologi dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya negara dan mencegah penyalahgunaan anggaran (Kusnadi dan Sari, 2024). Teknologi seperti sistem manajemen keuangan elektronik dan platform pelaporan berbasis web telah mempercepat dan mempercepat proses audit dan pengawasan. Teknologi ini memungkinkan pemantauan yang lebih ketat terhadap aliran dana dan memudahkan pengenalan penyimpangan sejak dini. Selain itu, penggunaan teknologi membuat lebih banyak orang dapat mengakses informasi keuangan. Akibatnya, orang lebih terlibat dalam mengawasi pengelolaan anggaran (Prasetya, 2023). Dengan cara ini,

teknologi tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah yang efektif dan jujur. Metode ini membantu memerangi korupsi dan memastikan bahwa sumber daya daerah digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan umum.

Selain itu, teknologi dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dana publik dengan otomatisasi pelaporan dan administrasi. Pemerintah dapat mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk proses administratif seperti pelaporan keuangan dan pengajuan dan persetujuan anggaran dengan menggunakan sistem informasi manajemen yang terintegrasi (Halim dan Widyastuti, 2024). Otomatisasi memungkinkan pemrosesan data yang lebih cepat dan akurat, mengurangi kemungkinan kesalahan manusia, dan mempercepat proses verifikasi. Selain itu, sistem ini memungkinkan pemantauan dan pelaporan yang lebih terstruktur, yang memungkinkan identifikasi masalah dan pengambilan keputusan yang lebih tepat waktu (Haryanto & Prabowo, 2023). Selain itu, pengawasan yang lebih efektif dapat dilakukan dengan teknologi ini karena memberikan data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan dan meningkatkan transparansi, yang dapat mengurangi kemungkinan penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan kata lain, penggunaan teknologi dalam pengelolaan dana daerah menghasilkan tata kelola yang lebih baik dan berkelanjutan dengan meningkatkan sistem akuntabilitas dan transparansi serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya.

Dengan kata lain, penggunaan teknologi dalam pengelolaan dana daerah membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sambil mengoptimalkan penggunaan dan alokasi sumber daya. Pemantauan aliran dana yang lebih akurat dan terbuka dapat dicapai melalui teknologi seperti sistem manajemen anggaran berbasis cloud dan aplikasi pelaporan berbasis data (Sutrisno & Aditya, 2024). Kepercayaan publik meningkat karena kemampuan untuk melakukan analisis data secara real-time dan memberikan laporan yang rinci, yang memungkinkan respons cepat terhadap penyimpangan atau ketidakefektifan. Teknologi membantu membangun tata kelola yang lebih bertanggung jawab dan konsisten dengan memfasilitasi lebih banyak informasi dan pengawasan yang lebih ketat. Tata kelola seperti itu dapat menunjukkan kepada publik bagaimana setiap keputusan dan penggunaan anggaran dilakukan (Rizki & Dewi, 2024). Ini tidak hanya memastikan bahwa dana publik digunakan dengan benar, tetapi juga memperkuat komitmen terhadap prinsip-prinsip manajemen keuangan yang transparan dan jujur.

Lebih jauh lagi, teknologi informasi membantu mengelola dana publik dan membuat pemerintah lebih transparan. Pemerintah dapat menyampaikan informasi penting kepada masyarakat dengan menggunakan alat digital seperti platform *website* daerah (Aulia & Nugroho, 2024). Dengan program seperti ini, orang dapat secara aktif terlibat dalam proses pengawasan, memberikan umpan balik yang bermanfaat, dan memantau penggunaan dana publik dengan jelas. Selain itu, laporan yang lebih rinci

dan mudah dipahami dapat dibuat karena teknologi mendukung sistem kontrol internal dan eksternal (Febriani & Wicaksono, 2024). Akses yang lebih mudah dan transparansi informasi membuat orang merasa lebih diberdayakan. Mereka juga lebih terlibat dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pemerintahan. Dengan cara ini, teknologi tidak hanya membuat proses pengelolaan lebih mudah, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, yang mendorong pembangunan tata kelola yang lebih baik dan berkelanjutan.

2.1.3. Pelaporan keuangan pemerintah daerah

Pada kenyataannya, laporan keuangan adalah kumpulan informasi penting yang berusaha disajikan oleh manajemen pemerintah sebagai pernyataan mengenai pemerintahan itu sendiri. Ini digunakan sebagai alat untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pelaporan sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan (Badruddin et al., 2019). Untuk menunjukkan pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan operasional pemerintahan, upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan pelaporan keuangan kepada publik. Dalam situasi ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) adalah pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas segala macam tugas yang berkaitan dengan operasi dan penganggaran keuangan daerah. Masyarakat umum dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dapat mengakses data keuangan melalui pelaporan ini. Untuk memastikan bahwa kinerja pemerintah sesuai dengan amanah rakyat, otoritas

pemerintah harus melaporkan informasi keuangan tentang kegiatan operasional dan pengeluaran lainnya.

Menurut Jones (1992) dalam Susiyah et al. (2018), tujuan laporan keuangan lembaga pemerintah adalah untuk memberikan informasi bermanfaat untuk melacak seberapa baik manajemen mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, laporan keuangan memberikan informasi untuk memenuhi kepentingan semua kelompok pengguna. Informasi ini dapat membantu semua pengguna memahami bagaimana pemerintah bekerja, melihat kondisi keuangan, mengawasi penggunaan sumber daya yang dikelola, dan membuat keputusan tentang distribusi sumber daya.

Menurut Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Pedoman Akuntansi Instansi Pemerintah, laporan keuangan adalah dokumen yang terstruktur yang mencakup informasi tentang posisi keuangan, realisasi anggaran, aliran kas, dan kinerja keuangan pada suatu entitas yang menyusun laporan, dengan tujuan dari laporan ini adalah untuk mengawasi dan meninjau keputusan oleh pihak yang terkait atas alokasi sumber daya. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik sejalan dengan peraturan tersebut. Undang-undang tersebut menekankan bahwa masyarakat harus dapat mengakses informasi dengan mudah, karena ini merupakan bagian penting dari menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Menurut undang-undang ini, semua lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah,

harus memastikan bahwa informasi publik tersedia dan dapat diakses secara cepat, mudah, dan dengan biaya yang seminimal mungkin. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan mengawasi kinerja pemerintah.

Studi terbaru oleh Nugraha dan Susanto (2023) menunjukkan bahwa penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik telah meningkatkan transparansi di berbagai bidang, terutama dalam hal pelaporan keuangan dan pengelolaan anggaran. Selain itu, akses informasi yang lebih baik membuat lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan data penting untuk mendukung advokasi dan keterlibatan dalam masalah penting. Selain itu, diharapkan bahwa ini akan mengurangi penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta mendorong budaya pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Kusuma et al. (2024) menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Diharapkan bahwa penerapan sistem informasi dan teknologi yang transparan di sektor publik akan secara signifikan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta mendorong budaya keterbukaan dan akuntabilitas di pemerintahan. Teknologi ini memungkinkan pelaporan yang lebih akurat dan pengawasan yang lebih ketat, yang pada gilirannya meningkatkan integritas dalam pengelolaan

dana publik (Susanto & Hidayati, 2024). Kusuma et al. (2024) menekankan bahwa keterbukaan informasi publik bukan hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga mendorong orang untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan sosial dan ekonomi. Dengan memiliki akses yang mudah ke informasi publik, orang dapat lebih aktif. Ini tidak hanya meningkatkan sistem akuntabilitas tetapi juga meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam pemerintahan, yang menghasilkan praktik yang lebih baik dan hasil yang lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dengan meningkatnya penggunaan sistem pelaporan yang transparan, pemerintah diharapkan dapat mendeteksi dan menangani penyalahgunaan anggaran dan korupsi dengan lebih baik. Misalnya, teknologi seperti *blockchain* memungkinkan pencatatan transaksi yang tidak dapat diubah dan transparan, yang mengurangi risiko manipulasi data dan meningkatkan akurasi pelaporan. Dengan menyediakan rekaman audit yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sistem ini mempermudah pengawasan masyarakat dan pihak berwenang. Selain itu, penggunaan teknologi ini membantu membangun budaya akuntabilitas di kalangan pejabat publik karena mereka tahu bahwa setiap tindakan mereka dapat dengan mudah dilacak dan dipantau (Arief & Lestari, 2024). Keterbukaan informasi yang lebih besar juga memungkinkan diskusi yang lebih konstruktif antara pemerintah dan masyarakat, yang memungkinkan umpan balik kebijakan publik yang lebih cepat dan responsif. Dengan demikian,

penggunaan teknologi dan peningkatan transparansi tidak hanya memperbaiki tata kelola tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, menciptakan lingkungan yang lebih terlibat dan menanggapi kebutuhan publik.

Dengan lebih banyak informasi terbuka, pemerintah dan masyarakat dapat berbicara lebih baik tentang kebijakan secara konstruktif. Teknologi digital, seperti forum online dan aplikasi pelaporan mobile, sangat membantu dalam komunikasi dua arah yang lebih efektif (Arief & Laila, 2024). Pemerintah dapat lebih mudah mengumpulkan dan menganalisis umpan balik masyarakat melalui platform ini. Ini memungkinkan penyesuaian kebijakan yang lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Metode ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang menghasilkan lingkungan yang lebih terbuka dan berpartisipasi (Riana & Mahendra, 2024). Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan responsif. Pada akhirnya, ini akan menghasilkan tata kelola yang lebih baik dan berkelanjutan.

Dengan meningkatkan keterbukaan dan partisipasi publik, penerapan teknologi dan transparansi dapat berdampak positif pada tata kelola pemerintahan. Masyarakat yang merasa terlibat lebih aktif dalam proses pembuatan kebijakan cenderung mendukung lebih banyak inisiatif pemerintah dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya (Halim &

Yuliana, 2024). Saluran komunikasi yang terbuka memungkinkan pemerintah untuk lebih mudah menemukan dan menangani masalah serta menyesuaikan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara real-time. Hal ini tidak hanya mempercepat proses adaptasi terhadap perubahan dan masalah, tetapi juga meningkatkan kinerja program pemerintah (Wahyudi & Sari, 2024). Ini berarti bahwa teknologi dan transparansi dapat mendorong pemerintahan yang lebih responsif dan adaptif. Pada gilirannya, ini akan membantu mencapai tujuan pelaporan keuangan yang lebih efisien dan berkelanjutan.

2.1.4. Pelaporan Keuangan Pada *Website*

Aksesibilitas laporan keuangan yang terkait dengan kemudahan pengguna untuk menemukan informasi keuangan yang disediakan dan diungkapkan melalui media internet dikenal sebagai pengungkapan pelaporan keuangan di web (Putri dan Setiawan, 2022). Pelaporan di internet bertujuan untuk memberikan informasi yang bermanfaat dan membantu pemerintah membuat keputusan yang efektif dan transparan, serta menjaga aksesibilitas publik dengan memilih dan membatasi informasi yang harus diungkapkan. Salah satu bentuk aksesibilitas ini adalah pengungkapan pelaporan keuangan melalui web, yang memungkinkan pengguna memperoleh informasi keuangan dengan mudah dan cepat melalui media internet. Tujuan pelaporan ini adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat, mendukung proses pengambilan keputusan pemerintah yang efektif dan transparan, dan memastikan bahwa informasi

yang relevan dapat diakses oleh masyarakat umum. Menurut Putri dan Setiawan (2022), pengungkapan informasi keuangan secara online meningkatkan akses masyarakat dan mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat, dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Dalam era komputer dan internet saat ini, menggunakan teknologi informasi untuk pelaporan keuangan menjadi sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik. Fauzan et al. (2023) menekankan bahwa pelaporan keuangan berbasis internet tidak hanya mempercepat proses pengiriman informasi, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk melihat secara langsung bagaimana dana publik digunakan dan dikelola. Ini dapat menghasilkan peningkatan kepercayaan publik dan memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah.

Untuk melindungi data sensitif dan menjaga keamanan data, penting untuk memperhatikan batasan yang diungkapkan. Sebuah studi terbaru oleh Wijayanti dan Suryadi (2024) menemukan bahwa pengungkapan informasi yang selektif dan bertanggung jawab sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang dikirim melalui internet tetap relevan, akurat, dan aman bagi semua pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, penggunaan laporan keuangan yang dapat diakses melalui internet merupakan langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik di Indonesia.

Untuk melindungi data sensitif dan menjaga keamanan data, penting untuk memperhatikan batasan yang diungkapkan. Pengungkapan data yang

terlalu luas tanpa mempertimbangkan faktor keamanan dapat mengakibatkan penyalahgunaan atau serangan siber. Sebuah studi terbaru oleh Wijayanti dan Suryadi (2024) menemukan bahwa pengungkapan informasi yang selektif dan bertanggung jawab sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang dikirim melalui internet tetap relevan, akurat, dan aman bagi semua pihak yang berkepentingan. Dalam situasi seperti ini, pelaporan keuangan yang dilakukan melalui internet harus dilengkapi dengan sistem keamanan yang canggih dan protokol privasi yang ketat. Untuk melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah, pemerintah harus menerapkan enkripsi data, autentikasi yang kuat, dan mekanisme kontrol akses. Selain itu, penting untuk memiliki kebijakan yang jelas tentang apa yang dapat dan tidak dapat dipublikasikan, dan mekanisme untuk menangani potensi kebocoran data atau pelanggaran keamanan.

Pelaporan keuangan berbasis internet dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan keterbukaan dan efisiensi pengelolaan keuangan publik di Indonesia sambil menjaga keamanan dan privasi data. Transparansi yang lebih baik akan dihasilkan sambil mempertahankan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan keuangan publik (Wijayanti & Suryadi, 2024). Pemerintah daerah juga harus memberi tahu publik tentang pentingnya perlindungan data pribadi dan privasi untuk mencapai keseimbangan antara transparansi dan keamanan informasi. Mengajarkan orang tentang cara data digunakan,

disimpan, dan dilindungi dapat membantu mereka menjadi lebih percaya pada sistem pelaporan keuangan online.

Untuk memastikan bahwa infrastruktur teknologi yang digunakan dalam pelaporan keuangan aman dan dapat diandalkan, pemerintah harus bekerja sama dengan penyedia layanan teknologi dan lembaga keamanan siber. Selain itu, evaluasi dan audit berkala sistem keamanan informasi sangat penting untuk menemukan dan memperbaiki kerentanan potensial sebelum dapat digunakan. Prinsip-prinsip keamanan data ini tidak hanya melindungi data pribadi dari ancaman luar, tetapi juga memastikan bahwa orang umum tetap dapat mengakses informasi yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pengawasan keuangan. Pendekatan yang holistik dan terintegrasi memungkinkan transparansi pelaporan keuangan tanpa mengorbankan keamanan dan integritas data. Pada akhirnya, ini akan mendukung tata kelola yang baik dan meningkatkan akuntabilitas publik (Wijayanti & Suryadi, 2024).

Pemerintah daerah menggunakan media internet untuk menyampaikan informasi kepada pengguna dan masyarakat dengan mudah dan tepat waktu (Rahman, 2013 dalam Kurniati dan Siddi, 2020). Organisasi pemerintah daerah menggunakan internet untuk digitalisasi dengan tujuan mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Pengungkapan data keuangan pemerintah daerah di internet merupakan cara mereka bertanggung jawab kepada publik atas anggaran yang mereka alokasikan. Pengungkapannya di internet akan

mendorong pemerintah untuk membuat sistem pemerintahannya lebih baik, terpercaya, transparan, dan efisien (Verawaty, 2015). Untuk melengkapi upaya tersebut, pemerintah daerah harus menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk menilai dampak dan efektivitas kebijakan pelaporan keuangan berbasis internet. Pemantauan rutin dapat membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan memastikan bahwa undang-undang yang diterapkan mencapai tujuan yang diharapkan. Stakeholder seperti masyarakat, auditor, dan pakar keamanan informasi harus berpartisipasi dalam evaluasi ini.

Selain itu, pemerintah harus menetapkan standar yang jelas untuk pengelolaan untuk memastikan bahwa setiap proses pengungkapan informasi dilakukan dengan mempertimbangkan risiko dan keuntungan. Ini termasuk menetapkan standar untuk pelaporan yang akurat dan tepat waktu, dan memastikan bahwa informasi yang diberikan dapat dipahami oleh publik dengan berbagai latar belakang. Langkah-langkah ini akan memastikan bahwa pelaporan keuangan di internet tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga melindungi data pemerintah dari potensi ancaman. Akibatnya, pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung akuntabilitas dan transparansi sambil melindungi informasi. Pada akhirnya, ini akan menghasilkan pengelolaan keuangan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (Wijayanti & Suryadi, 2024).

Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas internal mereka melalui pelatihan dan pengembangan karyawan untuk mengoptimalkan pelaporan keuangan berbasis internet dan memastikan bahwa itu efektif. Komponen teknis terkait penggunaan platform pelaporan, pemahaman tentang peraturan dan kebijakan terkait transparansi, dan keterampilan menangani data sensitif dengan aman harus menjadi bagian dari pelatihan. Dengan meningkatkan kemampuan pegawai, pemerintah dapat memastikan bahwa sistem pelaporan dijalankan secara profesional dan sesuai dengan peraturan. Selain itu, penerapan sistem pelaporan yang ramah pengguna sangat penting agar informasi yang disajikan dapat diakses dan dipahami dengan mudah oleh masyarakat umum. Desain antarmuka yang mudah digunakan dan navigasi yang sederhana dapat membantu masyarakat dalam melacak dan menilai kinerja keuangan pemerintah. Selain itu, sistem harus memberikan dukungan teknis dan panduan bagi pengguna untuk memaksimalkan manfaatnya.

Selain itu, evaluasi dan umpan balik harus membuat pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Metode pengambilan keputusan berbasis data dapat membantu menemukan masalah dan menetapkan prioritas untuk kemajuan. Penyesuaian yang cepat terhadap tuntutan baru akan memastikan sistem pelaporan tetap relevan dan berfungsi dengan baik untuk mencapai tujuan transparansi dan akuntabilitas. Metode komprehensif ini akan memungkinkan pelaporan keuangan di internet untuk meningkatkan transparansi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap

pengelolaan keuangan pemerintah. Dengan memastikan bahwa semua proses dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan integritas yang tinggi, program ini mendukung tata kelola yang baik (Wijayanti & Suryadi, 2024).

Oleh karena itu, upaya yang dilakukan pemerintah untuk membangun dan mewujudkan pemerintahan yang berkualitas, terpercaya, efektif, transparan, dan akuntabel, serta memaksimalkan pelayanan dan tingkat kepercayaan kepada publik adalah dengan melakukan keterbukaan informasi tentang proses dan laporan keuangan melalui situs web yang dikelola oleh pemerintah daerah dan mudah diakses oleh masyarakat. Intruksi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 18852/1797/SJ mengenai panduan untuk pelaporan anggaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, yang sangat koheren dan penting, mencakup 12 poin penting yang harus dilaporkan dan dipublikasikan oleh pemerintah daerah di situs web mereka, merupakan dasar untuk keterbukaan informasi keuangan ini. 12 poin penting tersebut meliputi:

1. Rangkuman RKA SKPD
2. Rangkuman RKA PPKD
3. Rancangan Peraturan Daerah
4. Rancangan Peraturan Daerah perubahan APBD
5. Peraturan Daerah APBD
6. Peraturan Daerah Perubahan APBD
7. Rangkuman DPA SKPD

8. Rangkuman DPA PPKD
9. LRA SKPD
10. LRA PPKD
11. LKPD yang sempurna dan melalui proses sudah diaudit
12. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

2.1.4.1. Transparansi

Transparansi adalah cara pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang cara pemerintah mengelola sumber daya yang dimiliki. Laporan keuangan adalah salah satu contoh dari kewajiban pemerintah untuk mengungkapkan informasi keuangan dan non keuangan yang akan digunakan oleh pihak yang bersangkutan untuk membuat keputusan (Oktavia dan Aliyah, 2022).

Transparansi memastikan bahwa publik dan pihak berkepentingan lainnya memiliki akses dan kebebasan untuk mengetahui tentang fungsi struktur pemerintahan. Perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan keuangan pemerintah adalah bagian dari transparansi yang disebutkan (Ulya dan Astuti, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa setiap golongan masyarakat berhak atas informasi tentang pengelolaan keuangan sesuai dengan kepentingan dan keperluan mereka. Sejauh mana publik dapat dengan mudah mengakses laporan keuangan akan menentukan transparansi, yang akan menghasilkan pemerintahan yang berkualitas, terpercaya, efektif, transparan, bertanggung jawab, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan publik sangat bergantung pada fakta bahwa laporan keuangan publik dapat diakses oleh masyarakat umum. Pada gilirannya, ini meningkatkan akuntabilitas horizontal antara pemerintah daerah dan masyarakat umum. Dengan memberikan akses yang mudah dan jelas terhadap laporan keuangan, pemerintah dapat memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan evaluasi yang lebih baik; masyarakat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan penting terhadap tindakan pemerintah (Rahayu & Prasetyo, 2024). Akuntabilitas horizontal memungkinkan masyarakat untuk secara aktif terlibat dalam menilai kinerja pemerintah, yang mendorong proses pengambilan keputusan yang transparan dan jujur. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan pemerintahan yang berkualitas tinggi yang tidak hanya terpercaya dan efektif tetapi juga responsif terhadap keinginan rakyat. Prinsip transparansi yang kuat membantu membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, yang menghasilkan pemerintahan yang lebih adil dan akuntabel (Setiawan & Hadi, 2024).

Transparansi laporan keuangan sangat penting untuk mendorong kinerja yang lebih baik dan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Dengan menyediakan data yang jelas dan mudah diakses, pemerintah dapat memastikan bahwa anggaran dan dana publik digunakan secara efisien dan sesuai dengan rencana (Wulandari & Nugroho, 2024). Informasi yang terbuka memungkinkan masyarakat untuk menilai hasil dan konsekuensi

dari kebijakan yang diterapkan. Ini juga memungkinkan mereka untuk memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan berkelanjutan. Selain itu, transparansi dapat membantu mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang karena pejabat publik lebih cenderung mengikuti peraturan ketika mereka tahu bahwa orang lain akan melihat apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, transparansi tidak hanya meningkatkan akuntabilitas tetapi juga membantu mencapai tujuan pembangunan yang lebih adil dan efisien serta menciptakan lingkungan yang mendukung kemajuan sosial dan ekonomi.

Selain itu, transparansi sangat penting untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Ketika masyarakat dan media melihat tindakan pejabat publik diawasi secara ketat, mereka lebih termotivasi untuk mematuhi peraturan dan prosedur (Setiawan & Maulana, 2024). Karena sistem pelaporan yang jelas dan mudah diakses, ketidakpatuhan atau penyalahgunaan akan lebih mudah ditemukan dan ditangani (Fahmi & Amalia, 2024). Transparansi ini tidak hanya meningkatkan integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, tetapi juga membantu mencapai tujuan pengungkapan laporan keuangan dengan cara yang lebih adil dan efisien. Pemerintah dapat mendorong kemajuan sosial dan ekonomi yang lebih inklusif dengan menciptakan lingkungan yang transparan di mana semua pihak dapat merasakan atas pengelolaan keuangan dengan merata.

Lebih jauh lagi, transparansi pemerintahan meningkatkan pengawasan dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam

pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan. Jika informasi tentang kebijakan, anggaran, dan hasil program tersedia secara publik, masyarakat dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dan terinformasi dalam perumusan dan evaluasi kebijakan (Prasetyo & Hadi, 2024). Dengan partisipasi yang aktif ini, ada kesempatan untuk diskusi yang lebih konstruktif dan kreatif, di mana kebutuhan masyarakat dan berbagai perspektif dapat dipertimbangkan saat membuat keputusan (Riska & Aditya, 2024). Dengan cara ini, transparansi tidak hanya meningkatkan akuntabilitas tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendorong kebijakan yang lebih responsif dan berorientasi pada hasil yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Hasil ini pada gilirannya mendorong kemajuan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pemerintah daerah dapat memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat dan berdampak positif dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan akses yang mudah terhadap informasi. Selain itu, transparansi membantu mengurangi kemungkinan penyalahgunaan wewenang dan korupsi, yang sering menghambat kemajuan sosial dan ekonomi. Akibatnya, transparansi menciptakan lingkungan yang lebih adil, terbuka, dan terbuka untuk semua orang (Kusuma et al., 2024; Oktavia & Aliyah, 2022).

Selain itu, membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat sangat penting melalui transparansi. Ketika pemerintah secara aktif memberikan informasi yang jelas dan terbuka tentang kebijakan, program, dan penggunaan anggaran, masyarakat merasa lebih terlibat dan dihargai dalam proses pengambilan keputusan. Ini tidak hanya meningkatkan kepuasan publik tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dengan transparansi yang baik, pemerintah dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah lebih cepat karena kritik dan umpan balik masyarakat dapat diakses secara langsung dan dipertimbangkan dalam perbaikan kebijakan. Proses ini menghasilkan kebijakan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang berubah. Misalnya, saluran transparansi dapat digunakan untuk memperbaiki atau menyesuaikan program yang awalnya tidak berhasil.

Selain itu, tata kelola yang jujur membantu membangun budaya pemerintahan yang baik di mana prinsip etika dan integritas diutamakan. Ini menciptakan lingkungan yang mendorong organisasi pemerintah untuk bekerja lebih baik dan lebih adil. Masyarakat menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan proses pelaporan keuangan yang lebih efektif. Pada akhirnya, metode ini membantu mencapai tujuan transparansi pelaporan keuangan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan memastikan bahwa semua orang mendapatkan manfaat dari keterbukaan akses informasi keuangan oleh pemerintah

(Mardiasmo, 2009 dalam Wardani & Fajar, 2024). Selain itu, prinsip transparansi memungkinkan pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan publik dengan lebih baik. Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi lebih aktif dalam proses transparansi pemerintah dengan keyakinan bahwa prosesnya adil dan kompetitif. Hal ini mendorong kreativitas dan meningkatkan kualitas layanan pada pelaporan keuangan oleh pemerintah

Upaya untuk meningkatkan literasi masyarakat dan meningkatkan partisipasi mereka dalam proses demokrasi juga merupakan bagian penting dari transparansi. Akses yang mudah dan jelas terhadap informasi membuat orang lebih mampu membuat keputusan yang cerdas dan terlibat aktif dalam proses politik dan sosial. Akibatnya, masyarakat yang lebih sadar dan terlibat meningkatkan demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Pemerintah daerah dapat melakukan upaya mempublikasikan pelaporan keuangan di *website* yang inklusif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan transparansi sebagai alat untuk memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Setiap kebijakan dan keputusan yang dibuat akan didukung oleh partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan dan memiliki dasar yang kuat (Oktavia & Aliyah, 2022 dalam Kusuma et al., 2024).

2.1.4.2. Akuntabilitas

Ulya dan Astuti (2018) mendefinisikan akuntabilitas pemerintahan sebagai penyebaran informasi tentang kinerja dan tindakan pemerintah kepada publik dan pihak-pihak terkait lainnya yang bertujuan untuk

memenuhi kewajibannya, sehingga pemerintah pusat dan daerah yang bertindak sebagai pemberi informasi melakukan pengungkapan informasi tersebut. Ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah tidak dapat diukur kecuali mereka melakukan pengungkapan kepada masyarakat dan publik mengenai informasi tentang pengelolaan keuangan, anggaran, dan sumber daya serta penggunaan mereka. Setelah itu, data ini akan digunakan sebagai bukti bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat.

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kewajibannya terkait akuntabilitas dapat dilakukan dengan upaya yang mereka lakukan yaitu dengan mengungkapkan laporan keuangan daerah serta laporan tentang hasil metode akuntansi keuangan untuk pengelolaan sumber daya yang dimiliki (Alhajjriana et al., 2017). Dalam akuntabilitas, metode pengungkapan laporan keuangan dan akuntansi ini sangat penting dilakukan untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, satu-satunya cara pemerintah daerah benar-benar bertanggung jawab kepada masyarakat adalah dengan mempublikasikan laporan keuangan secara online. Pemerintah daerah dapat menggunakan teknologi ini untuk mendukung pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab dengan meningkatkan transparansi informasi keuangan. Dengan bantuan *website* pelaporan real-time dan portal transparansi keuangan, masyarakat umum dapat dengan mudah dan cepat mengakses informasi tentang anggaran dan pengeluaran (Yuliana & Santosa, 2024). Ini meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan anggaran. Selain itu, ini mendorong

masyarakat untuk lebih terlibat dalam menilai dan mengawasi kebijakan (Indriani & Putra, 2024). Dengan pemerintah daerah yang lebih transparan, mereka dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap kejujuran dan efisiensi serta memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara optimal untuk kepentingan umum. Dengan lebih banyak transparansi, masyarakat dapat memberikan kritik dan masukan yang konstruktif untuk membantu pemerintah membuat keputusan yang lebih akurat dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah daerah dapat menggunakan teknologi internet untuk berbagi informasi keuangan untuk membuat sistem yang lebih proaktif dan responsif terhadap tuntutan transparansi masyarakat. masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan mengevaluasi data keuangan secara langsung mendorong masyarakat untuk lebih terlibat dalam pembicaraan tentang kebijakan publik dan pengelolaan sumber daya. Akibatnya, pemerintah daerah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menunjukkan komitmen yang jelas terhadap akuntabilitas dan transparansi.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, pemerintah daerah harus melakukan tindakan rencana yang berbasis pada prinsip akuntabilitas dan transparansi. Salah satu cara yang efektif adalah dengan membangun sistem pelaporan yang jelas dan terstruktur yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang penggunaan anggaran dan hasil dari berbagai program

pemerintah. Sistem ini harus didukung oleh teknologi informasi yang memungkinkan akses data secara real-time dan memungkinkan warga untuk memberikan umpan balik. Pemerintah daerah juga harus mendukung sistem pengawasan independen yang dapat menilai kinerja dan memastikan kepatuhan terhadap standar serta memberikan pelatihan kepada pegawai publik tentang pentingnya akuntabilitas dan transparansi. Dengan mengambil langkah-langkah ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi layanan publik dan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Pada akhirnya, ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan keterlibatan mereka dalam pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Teori bahwa transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik sejalan dengan pendekatan ini (Mardiasmo, 2009 dalam Oktavia & Aliyah, 2022).

Pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan anggaran dan program publik dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ini mencakup pembuatan anggaran yang melibatkan konsultasi publik, di mana publik dapat memberikan umpan balik dan mengajukan pertanyaan tentang bagaimana dana dialokasikan dan apa yang harus diprioritaskan untuk program. Selain itu, pemerintah daerah harus memiliki sistem pelaporan yang konsisten dan lengkap yang melaporkan kemajuan, masalah, dan penggunaan anggaran setiap tahun. Penggunaan platform digital untuk publikasi informasi seperti situs web resmi dapat meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi masyarakat dalam

situasi seperti ini. Melalui pendidikan dan pelatihan tentang etika dan kepatuhan, sangat penting untuk menumbuhkan budaya keterbukaan di antara pegawai negeri. Ini meningkatkan integritas pemerintahan dan mengurangi kemungkinan penyimpangan dan korupsi. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak hanya memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Teori bahwa partisipasi masyarakat dan transparansi yang tinggi dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemerintah juga mendukung penerapan prinsip-prinsip ini (Wardani & Fajar, 2024).

Jika mereka ingin terus meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, pemerintah daerah harus berkonsentrasi pada penyempurnaan sistem pengawasan dan evaluasi internal. Ini mencakup audit internal yang rutin untuk memastikan bahwa semua proses sesuai dengan peraturan dan standar yang telah ditetapkan. Audit ini harus dilakukan oleh pihak yang independen dan kompeten untuk menghindari konflik kepentingan dan meningkatkan kredibilitas hasil. Selain itu, membangun sistem umpan balik yang bermanfaat bagi masyarakat sangat penting. Sistem ini harus memungkinkan warga untuk dengan mudah menyampaikan keluhan atau saran dan mendapatkan tanggapan yang cepat dan memadai. Pemerintah daerah juga harus menggunakan data ini untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam layanan publik. Dengan melakukan hal ini, pemerintah menunjukkan

komitmen mereka terhadap akuntabilitas dan transparansi dan menciptakan budaya kepercayaan dan keterlibatan masyarakat yang aktif. Dalam pengelolaan publik, integritas, transparansi, dan keterlibatan sangat penting (Oktavia & Aliyah, 2022). Prinsip-prinsip ini sejalan dengan penerapan strategi ini. Selain itu, pemerintah daerah harus memiliki strategi komunikasi yang efektif untuk memberi tahu masyarakat tentang kebijakan, program, dan hasil evaluasi. Komunikasi yang jelas dan terbuka membantu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan publik. Dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi, seperti buletin, forum komunitas, dan media sosial, pemerintah daerah dapat menjangkau berbagai kelompok orang. Melibatkan media lokal dalam penyebaran informasi juga dapat memperluas jangkauan pesan dan memastikan informasi penting tentang program dan kebijakan pemerintah dapat diakses oleh semua orang.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan keterampilan dan kapasitas pegawai publik sangat penting. Pemerintah daerah harus memberikan pelatihan dan pengembangan profesional untuk memastikan bahwa karyawan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan efektif dan efisien. Ini mencakup etika publik, penggunaan teknologi informasi, dan pelatihan manajemen. Metode ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membuat lingkungan di mana pelayanan publik dilakukan dengan standar tinggi, akuntabilitas dipertahankan, dan kepercayaan masyarakat terus

diperkuat. Tata kelola yang baik mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat (Mardiasmo, 2009; Wardani & Fajar, 2024).

Pemerintah daerah juga harus menyadari pentingnya meningkatkan sistem pengaduan dan perlindungan untuk meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi peluang penyimpangan. Pegawai pemerintah juga harus dievaluasi secara teratur untuk memastikan kualitas pelayanan publik tetap tinggi. Pelayanan, kepuasan masyarakat, dan pencapaian target semuanya harus dinilai. Pemerintah daerah harus menggunakan hasil evaluasi ini untuk memperbaiki proses dan memberikan pelatihan tambahan jika diperlukan. Melalui sistem evaluasi yang terbuka dan berfokus pada perbaikan, pemerintah daerah dapat menentukan area mana yang perlu diperhatikan dan melakukan perubahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Langkah-langkah ini didukung oleh prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak-hak individu dalam mengelola sumber daya publik. Metode ini memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat (Oktavia & Aliyah, 2022).

2.2. Penelitian Terdahulu

Studi sebelumnya yang telah berhasil untuk dilakukan serta memiliki hubungan dan berkaitan dengan penerbitan laporan keuangan di situs web pemerintah daerah adalah sebagai berikut, yakni :

Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu

No	Nama, Tahun, judul Penelitian	Variabel	Sampel	Hasilnya
1.	Saraswati et al., (2019) “Publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di internet dan faktor yang memengaruhinya”	Dependen: Hasil objek publikasi berupa laporan keuangan yang terdapat di internet. Independen: Opini audit, belanja daerah, pendapatan per kapita, serta eksistensi LPSE.	Populasi: Pemkot dan pemerintah kabupaten di Pulau Jawa berjumlah 113 daerah pemerintahan. Sampel: Metode Purposive Sampling, yaitu pemkab/pemkot di Pulau Jawa, mempunyai <i>website</i> resmi, dan ketersediaan laporan keuangan dari pemerintah daerah untuk tahun anggaran 2014.	Belanja daerah dan pendapatan per kapita berperan dalam memengaruhi penerbitan laporan keuangan pemerintah daerah di situs internet, sedangkan lainnya tidak berpengaruh
2.	Sofyani dan Dwirama, (2019) “Determinan praktik internet reporting oleh pemerintah daerah di Indonesia”	Dependen: Internet reporting oleh Pemerintah Daerah di Indonesia. Independen: kompetisi politik, kekayaan daerah, dan opini audit.	Populasi: 415 Pemda Terdapat 93 kota dan 514 kabupaten pada tahun 2017. Sampel: Mengambil 48 pemda Tingkat kabupaten dan kota pada tahun 2017 yang mencatatkan 13 data lengkap mengenai praktik pelaporan internet.	Semua variabel independen mempengaruhi secara konstruktif terhadap pelaporan pemerintah daerah di internet.

3.	<p>Hadianto dan Murtin, (2020)</p> <p>“Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan internet financial reporting di indonesia”</p>	<p>Dependen: Pengungkapan Laporan Keuangan Berbasis Internet oleh pemerintah daerah.</p> <p>Independen: kompetisi politik, ukuran pemerintah daerah, rasio pembiayaan utang, pendapatan per kapita, kekayaan daerah, opini audit.</p>	<p>Populasi: 514 daerah administratif di Indonesia</p> <p>Sampel: Teknik acak atau random sampling 66 sampel diacak acak menggunakan rumus pada microsoft excel</p>	<p>Hanya variabel independen berupa Ukuran Pemda saja yang memberikan dampak positif terhadap pengungkapan laporan keuangan berbasis internet di pemerintahan daerah.</p>
4.	<p>Hardiningsih et al., (2021)</p> <p>“Digitalisasi publikasi laporan keuangan daerah”</p>	<p>Dependen: Pengungkapan laporan keuangan <i>website</i></p> <p>Independen: Aksesibilitas, Ukuran Pemerintahan, opini audit.</p> <p>Kontrol: Kemandirian wilayah</p>	<p>Populasi: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Jawa Tengah mencakup 29 kabupaten dan 6 kota untuk tahun anggaran 2015 hingga 2018 yang telah melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).</p> <p>Sampel: seluruh populasi yangmana terdapat atau ada di wilayah tersebut.</p>	<p>Semua variabel independen memiliki positif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemda di <i>website</i>.</p>
5.	<p>Yunita, (2021)</p> <p>“Faktor - faktor yang</p>	<p>Dependen: Publikasi LKPD di Internet</p>	<p>Populasi: Pemda di wilayah kabupaten dan</p>	<p>Semua variabel independen tidak berdampak</p>

	mempengaruhi publikasi informasi keuangan pada <i>website</i> resmi pemerintah daerah se-jawa tengah”	Independen: Kompetisi Politik, Masa Jabatan, Opini Audit BPK, Kekayaan Daerah, Leverage, Belanja Daerah.	kota yang ada di Jawa Tengah. Sampel: seluruh pemda di Provinsi Jawa Tengah.	pada publikasi LKPD di situs web pemerintah daerah.
6.	Kurniati dan Siddi, (2020) “Pengaruh kekayaan daerah, jenis pemerintahan, dan kualitas audit terhadap pengungkapan internet-based financial reporting”	Dependen: Pengungkapan IBFR Independen: Kekayaan pemerintah daerah, Kompleksitas pemerintah daerah, jenis pemerintah daerah, dan mutu audit.	Populasi: Semua pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota di Jawa tahun 2018 Sampel: 102 pemda yang terdiri dari 26 pemda yang mempublikasikan laporan keuangan mereka melalui situs web dan 76 pemerintah daerah yang tidak mengunggah laporan keuangan di situs web.	Semua Variabel bebas memberikan dampak yang positif terhadap variabel terikat.
7.	Putri dan Setiawan, (2022) “Pengaruh kekayaan daerah dan belanja daerah terhadap pengungkapan IFR pada pemda”	Dependen: Pengungkapan IFR Independen: Kekayaan daerah, belanja daerah	Populasi: Pemda kabupaten/kota daripada yang ada di berbagai wilayah provinsi sumatra bagian barat Sampel: 19 Pemda daerah/wilayah dibagian provinsi Sumatera Barat.	Hanya variabel independen berupa belanja daerah adalah satu-satunya faktor yang berpengaruh terhadap penyampaian laporan IFR, sedangkan lainnya tidak berpengaruh

8.	Masra dan Sari, (2020) “Faktor yang mempengaruhi IFR pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat”	Dependen: Internet finansial reporting Independen: Ukuran pemerintah, PDRB perkapita, belanja daerah	Populasi: Pemda di wilayah kabupaten/kota di Sumatera bagian Barat. Sampel: Mengaplikasikan teknik purposive sampling dengan syarat bahwa pemerintah daerah memiliki laporan keuangan yang sudah diaudit oleh BPK	PDRB perkapita dan belanja daerah mempunyai pengaruh positif terhadap IFR di pemerintah daerah Sumatera bagian Barat yang mana lainnya tidak berpengaruh
9.	Oktavia dan Aliyah, (2022) “Analisis faktor yang mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah”	Dependen: Penerapan transparansi dalam pelaporan keuangan daerah. Independen: Tekanan eksternal, Komitmen manajemen, Akuntabilitas, tingkat transparansi laporan keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah, faktor politik, kompetensi SDM, Ketidakpastian lingkungan	Populasi: Organisasi perangkat daerah kabupaten jepara Sampel: Seluruh anggota populasi yang berjumlah 78 orang.	Hanya variabel independen berupa Ketidakpastian lingkungan saja yang mempengaruhi penerapan transparansi dalam pelaporan keuangan daerah.
10.	Winangsih dan Fathah, (2023)	Dependen:	Populasi: Setiap pemerintah	Variabel independen berupa opini

	“Faktor yang mempengaruhi internet financial reporting pada <i>website</i> pemda di indonesia”	Internet finansial reporting Independen: Belanja daerah, jumlah warga, opini audit, kekayaan daerah.	daerah tingkat kabupaten dan kota di seluruh pelosok wilayah yang terdapat dalam wilayah Indonesia. Sampel: 30 pemerintahan pada tingkatan kabupaten beserta kota yang terdapat di berbagai wilayah Indonesia	audit dan kekayaan daerah yang berkontribusi terhadap IFR, sedangkan lainnya tidak berpengaruh
11.	Nurhidayyati dan Rahayur, (2020) “Determinan pengungkapan lkpdp pada <i>website</i> resmi pemda provinsi di indonesia tahun 2017”	Dependen: Pengungkapan LKPD pada <i>website</i> pemda Independen: Kondisi keuangan, kekayaan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.	Populasi: Laporan dari rencana proses data keuangan 34 pemda provinsi di Indonesia Sampel: Laporan keuangan 34 pemda provinsi di Indonesia	Semua variabel independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan LKPD pada <i>website</i> pemda tahun 2017.
12.	Bahrudin et al., (2019) “Pengaruh kemandirian daerah, tingkat ketergantungan, ukuran pemerintah daerah dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah”	Dependen: Tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Independen: Kemandirian daerah, tingkat ketergantungan, ukuran pemerintah daerah, temuan audit	Populasi: Pemerintah daerah kabupaten Aceh Utara Sampel: Sebagian atau wakil populasi yang diteliti	Variabel independen berupa kemandirian daerah dan tingkat ketergantungan yang memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintahan daerah, sedangkan lainnya yang mana tidak

				memiliki pengaruh ataupun dampak
--	--	--	--	----------------------------------

2.2. Hipotesis Penelitian

Pengembangan hipotesis yang dirumuskan pada studi ini bertujuan untuk menguji dampak dan pengaruh dari kompetisi politik, belanja daerah, dan ukuran pemerintah daerah terhadap publikasi laporan keuangan di situs *web* resmi pemerintah daerah. Sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, penelitian ini mengusulkan hipotesis yang dinyatakan sebagai berikut :

2.2.1. Pengaruh Kompetisi Politik Terhadap Publikasi Laporan Keuangan Dalam *Website* Pemerintah Daerah

Konsep Teori sinyal menjelaskan bahwa pemerintah merupakan entitas yang diberi kekuasaan oleh masyarakat dengan maksud untuk berkontribusi sebagai pihak yang menunjukkan sinyal kepada masyarakat. Maka pada penelitian Rahman (2013) dalam Sofyani dan Dwirama (2019) mengungkapkan bahwa untuk menunjukkan sinyal oleh pemerintah kepada masyarakat diperlukan media internet yang efisien dan murah untuk melaporkan informasi keuangan suatu pemerintah daerah dan melaporkan kinerjanya kepada masyarakat. Teori ini diperkuat dengan diterbitkannya Intruksi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) No. 18852/1797/SJ mengenai panduan untuk pelaporan anggaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah pada wilayah pemerintahan pada tiap-tiap daerah. Dalam intruksi tersebut Mendagri

mengharuskan kepada pemerintah daerah agar melaporkan informasi anggaran melalui *website* pribadi pemerintah daerah.

Peraturan yang telah diterbitkan tersebut menghimbau pemerintah daerah agar lebih teliti dalam menyajikan informasi tentang keuangan dan kinerja mereka di situs web mereka. Untuk memelihara hubungan yang harmonis antara dua aspek penting yakni pada cakupan pemerintah dan ranah masyarakat, membutuhkan informasi keuangan yang jelas dan transparan agar masyarakat dapat memberikan penilaian yang positif. Penilaian yang baik oleh masyarakat berkat adanya pengungkapan laporan keuangan yang transparan memberikan peluang bagi pejabat daerah yang telah terpilih untuk dapat menjabat kembali pada pemilu periode selanjutnya (Trissnawati dan Achmad, 2014). Penelitian Rahman et al., (2011) dalam Trissnawati dan Achmad (2014) menyebutkan bahwa semakin tinggi tingkat persaingan politik dalam konteks pemerintahan daerah semakin mendorong pemerintah untuk menyebarluaskan laporan keuangan mereka secara daring melalui publikasi dalam website.

Untuk mencegah lawan politik menginformasikan setiap penyimpangan oleh kepala pemerintahan yang sedang menjabat dan lingkungan politik yang semakin kompetitif maka pemerintah daerah mempublikasi laporan keuangan guna tetap menjaga hubungan baik serta tetap memberikan sinyal baik kepada masyarakat agar terhindar dari terjadinya asimetri informasi.

Hal ini didukung oleh penelitian Nurhunah et al., (2023) dan Trissnawati dan Achmad (2014) yang mengungkapkan terkait bahwasanya variabel kompetisi politik berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah. Dari penjabaran tersebut, maka dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis yaitu sebagai berikut:

H1: Kompetisi politik mempunyai pengaruh positif terhadap publikasi laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah

2.2.2. Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Publikasi Laporan Keuangan Dalam *Website* Pemerintah Daerah

Dasar dari teori keagenan adalah pemerintah mempunyai tanggungjawab kepada masyarakat berupa pelaksanaan sebuah layanan dalam pemberian keputusan secara optimal bagi masyarakat. Salah satu bentuk tanggungjawab yang diamanahkan oleh masyarakat yaitu mengenai pengelolaan keuangan atau kekayaan daerah yang telah dipercayakan kepada pemerintah daerah. Teori keagenan menganggap pemerintah daerah bertindak sebagai agent sedangkan masyarakat/publik dan stakeholder lainnya bertindak sebagai principal. Amanat dan kepercayaan diberikan oleh masyarakat sebagai principal kepada pemerintah daerah guna melaksanakan pemerintahannya dan untuk melaporkan hasil pelaksanaan kinerjanya secara transparan kepada masyarakat/publik.

Bentuk tanggungjawab yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan atau kekayaan daerah tersebut berupa penyajian laporan keuangan. Belanja daerah merupakan informasi yang krusial untuk

disampaikan karena menggambarkan alokasi dana oleh pemerintah daerah yang mana fungsinya untuk memenuhi kebutuhan daerah. Apabila belanja daerah semakin besar, berarti pemerintah daerah membelanjakan anggaran tersebut untuk menunjang kebutuhan publik juga semakin gencar, sehingga pemerintah daerah semakin terdorong untuk mengungkapkan informasi keuangannya kepada masyarakat melalui *website*-nya (Putri dan Setiawan, 2022). Dengan adanya pengungkapan dan dari dengan adanya informasi keuangan yang disediakan melalui situs resmi pemerintah daerah, masyarakat akan semakin mudah dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola dan membelanjakan uang negara. Alasan belanja daerah menjadi faktor pendorong pemerintah dalam pengungkapan laporan keuangannya adalah karena semakin tinggi tingkat belanja daerah maka pemerintah membuktikan bahwa mereka memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal dan fasilitas publik juga dapat dirasakan secara optimal.

Hal tersebut didukung dengan adanya penelitian Saraswati et al., (2019), Putri dan Setiawan (2022), Masra dan Sari (2020), Nurhunah et al., (2023) yang didalam penelitiannya menyatakan bahwa belanja daerah memiliki dampak terhadap pengungkapan laporan keuangan di situs web pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang akan diusulkan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut antara lain:

H2 : Belanja daerah mempunyai pengaruh positif terhadap publikasi laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah

2.2.3. Pengaruh Ukuran Pemerintah Terhadap Publikasi Laporan Keuangan Dalam Website Pemerintah Daerah

Total aset yang dimiliki menentukan besar kecilnya ukuran suatu pemerintahan. Apabila semakin sedikit aset yang dimiliki menunjukkan kecilnya pemerintahan tersebut, begitupun sebaliknya (Susiyah et al., 2018). Artinya, Pemerintah daerah yang berukuran besar tentu akan memiliki sumber daya yang melimpah pula. Jika jumlah aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah semakin meningkat, maka pengelolaan dan penjagaan aset tersebut juga akan semakin ketat serta mempunyai tanggungjawab atas pelaporan yang lebih besar kepada publik dan masyarakat. Sehingga total aset pemerintah yang semakin banyak jumlahnya akan mendorong pemerintah daerah untuk lebih kompleks dalam pengelolaan keuangannya sehingga sangat diperlukan publikasi laporan keuangan pada pengungkapannya untuk meminimalisasikan adanya asimetri informasi.

Konsep teori agensi menganggap bahwa untuk ukuran pemerintahan yang besar diperlukan adanya pengawasan yang ketat terkait penyelenggaraan pemerintahan dan diungkapkan kepada masyarakat. Serta dibutuhkan peningkatan pengawasan kepada pemerintah tentang pengelolaan aset untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi. Agar dapat meningkatkan hubungan antar pemerintah dan masyarakat tersebut diperlukan usaha dari pemerintah yaitu transparansi informasi yang harus dilaporkan dan kemudahan akses pada informasi tersebut. Sehingga sangat perlu dilakukan penyajian laporan finansial yang disajikan melalui situs web

pemerintah daerah dan pengeluaran yang ditanggung oleh pihak yang berwenang.

Studi yang dilakukan oleh Hadianto dan Murtin (2020), Hardiningsih et al. (2021), serta Bahruddin et al. (2019) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap penerbitan laporan keuangan di situs web resmi pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam kajian ini, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H3 : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap publikasi laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah

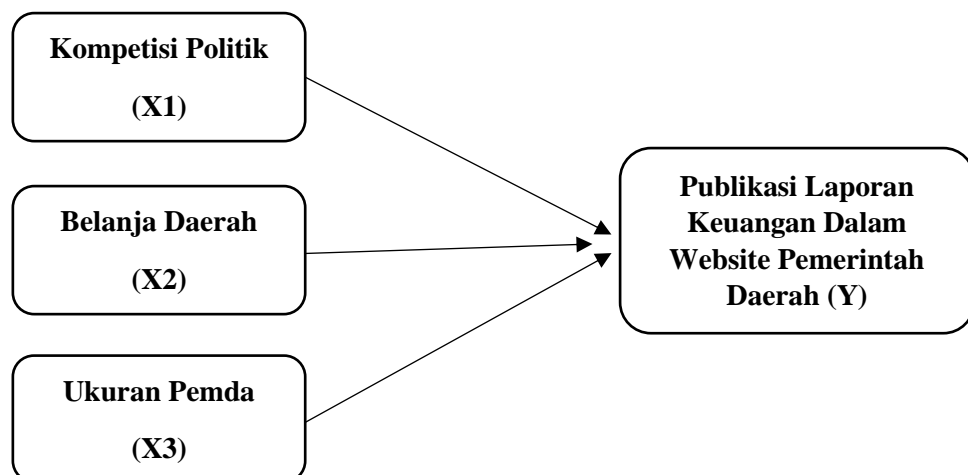
2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Dasar teori yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teori agensi dan teori sinyal. Teori keagenan menjelaskan dinamika antara dua pihak dalam dunia ekonomi, yaitu agen dan prinsipal, yang sering kali memiliki kepentingan yang saling berkonflik. Upaya untuk meminimalisir dampak negatif dari hal yang bertentangan tersebut dibutuhkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas oleh pemerintah tentang pengelolaan kegiatan pemerintahan untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi agar dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Sedangkan teori sinyal menjelaskan bahwa masyarakat memberikan amanah kepada pemerintah yang mempunyai keinginan untuk memperlihatkan signal kepada masyarakat/publik. Maksud menunjukkan signal oleh pemerintah kepada masyarakat yaitu mengungkapkan informasi-informasi penting maupun sukarela baik keuangan, non-keuangan,

ataupun kinerjanya secara akurat dan berkualitas pada *website* pemerintah daerah.

Pentingnya penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola aset dan anggaran pemerintah daerah merupakan perwujudan kinerja pemerintahan yang baik serta jujur dan berintegritas tinggi. Dalam penerapan transparansi, pemerintah melakukan sebuah upaya yaitu berupa publikasi Laporan keuangan yang terdapat di situs resmi pemerintah daerah yang mana hal tersebut mudah dan bebas untuk diakses oleh masyarakat maupun publik secara umum sebagaimana dalam upaya pemenuhan haknya memperoleh transparansi informasi masyarakat.

Variabel dalam penelitian ini, berupaya untuk memahami pengaruh serta hubungan antar variabel, terdapat dua kategori yang digunakan, yaitu variabel dependen (yang dipengaruhi) dan variabel independen (yang mempengaruhi). Dependennya berupa Publikasi Laporan Keuangan pada *Website* Pemerintahan Daerah (Y) sedangkan variabel independennya berupa kompetisi politik (X1), belanja daerah (X2), dan ukuran pemerintah daerah (X3). Dengan demikian, dalam studi ini, struktur pemikirannya adalah sebagai berikut antara lain yakni:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Teoritis



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Studi ini menggunakan metode (jenis) penelitian eksplanatori. Model penelitian berjenis eksplanatori (*explanatory research*) merupakan salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dampak dari satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikatnya (Mukhlisin, 2020). Sedangkan pendekatannya menggunakan metode kuantitatif yang menerangkan hubungan sebab akibat antara variabel yang diteliti. Purwanza et al., (2020) mengungkapkan bahwa Penelitian kuantitatif adalah usaha dalam menyelidiki suatu permasalahan yang didasarkan oleh pengetahuan empiris yang isinya mengaitkan teori, model, hipotesis, dan subjek dari penelitian itu sendiri. Metode dari penelitian tersebut yaitu mengolah data menjadi angka yang digunakan sebagai alat analisis dari hasil temuannya yang bersifat deskriptif, korelatif, dan berdasarkan hubungan antar variabel. Dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menggambarkan pengaruh dari kompetisi politik, belanja daerah, serta ukuran pemerintah daerah terhadap kaitannya dengan publikasi laporan keuangan di situs resmi pemerintahan daerah di Provinsi Jawa bagian Tengah/ Jawa Tengah.

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi merujuk pada sekelompok objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu maupun khusus dan karakteristik tertentu

dalam sebuah wilayah generalisasi, yang mana kemudian kesimpulan dapat diambil (Sugiyono, 2019). Artinya, populasi adalah objek penelitian secara keseluruhan yang memuat tentang benda, manusia, tumbuhan, hewan, gejala, atau peristiwa yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian yang memiliki ciri-ciri khusus guna untuk dipelajari sebagai modal pengambilan kesimpulan (Purwanza et al., 2022).

Dalam studi ini, populasi yang diteliti mencakup seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri atas 35 entitas, yaitu 29 kabupaten dan 6 wilayah kota yang mana data ini telah peneliti dapat atau diperoleh dari (<https://jateng.bps.go.id/>) dengan total periode pengamatan selama satu tahun pada periode tahun 2022. Penelitian ini menggunakan periode tahun 2022 dikarenakan tahun tersebut merupakan publikasian laporan keuangan paling terbaru dan kelengkapan data pada tahun tersebut sudah dapat diakses pada masing-masing website pemda untuk saat ini. Menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 189-193, Laporan keuangan SKPD wajib disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya dua bulan setelah penutupan tahun anggaran buku pada setiap pemerintahan masing-masing daerah yang ada. Dipilihnya provinsi jawa tengah sebagai objek yang akan diteliti dikarenakan masih sedikitnya penelitian yang membahas mengenai publikasi laporan keuangan di tingkat pemerintah daerah provinsi tersebut. Dengan demikian, peneliti berusaha untuk melaksanakan penelitian agar pemerintah daerah serta masyarakat dapat memahami dengan pasti faktor-

faktor yang memengaruhi publikasi laporan keuangan di situs *web* pemerintah daerah agar mudah diakses dan dilakukan penilaian secara efisien oleh masyarakat umum yang terdapat dalam wilayah daerah tersebut.

3.2.2. Sampel

Menurut Sugiyono (2019), sampel dapat diartikan sebagai sekelompok komponen dari total populasi dan karakteristiknya milik populasi tersebut. Studi ini menerapkan metode pengambilan sampel secara purposif dalam pemilihan sampelnya, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan alasan dan pertimbangan khusus atau kriteria. Kriteria tertentu tersebut antara lain:

1. Pemerintah daerah di wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah di wilayah daerah dengan mempunyai website yang resmi atau bisa diakses.
3. Pemerintah daerah yang melakukan pelaporan adanya Laporan dari perwujudan atau Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan neraca yang mana sudah selesai diaudit dalam rentan tahun 2022.
4. Pemerintah daerah yang mempunyai data secara statistik lengkap mengenai bagian kewajiban dan juga perihal aset.
5. Pemerintah daerah yang mempunyai data mengenai kompetisi politik dalam pemilihan umum kepala daerah terakhir yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencakup jumlah calon kandidat yang ikut serta didalamnya.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yang mana data sekunder tersebut merupakan data yang sudah tersedia dari sumber pihak kedua atau secara tidak langsung, yang biasanya sumber tersebut milik pemerintah atau perpustakaan (Purwanza, 2022). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan informasi yang telah dipublikasikan oleh pemerintah daerah melalui situs resmi mereka masing-masing. Selain itu, juga dilengkapi dengan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dari kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2022 yang diperoleh dari sumber yang relevan dengan pusat informasi dan komunikasi BPK.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan dokumentasi pada LKPD. Ini dilakukan dengan mengunjungi situs *web* resmi pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah untuk mengumpulkan data yang diperlukan, mencatat informasi penting, dan menganalisis laporan keuangan yang terdapat pada cakupan pemerintah daerah pada tahun 2022. Data variabel independen diambil dan dikumpulkan dari LKPD yang sudah diaudit BPK yang di publikasikan melalui situs resmi (<https://www.bpk.go.id/>) dengan menggunakan format *pdf*. Dokumen yang digunakan yaitu dokumen sekunder yang berupa laporan keuangan untuk membuktikan apa saja pengaruh dari berbagai macam faktor dalam pengungkapan dan pempublikasikan laporan keuangan oleh pemda pada *website* tiap-tiap pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah.

3.5. Operasional Variabel

Penjabaran variabel disebut sebagai variabel operasional. Berupa tindakan yang dilakukan secara sistematis yaitu dengan cara yang jelas, terukur, dan praktis agar dapat digunakan dalam penelitian. Ini mencakup cara-cara spesifik untuk mengukur dan mengamati variabel dalam konteks studi (Sugiyono S. , 2019).

3.5.1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen atau terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi konsekuensi dari perubahan yang terjadi pada variabel independen (Sugiyono, 2019). Variabel dependen yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu Publikasi Laporan Keuangan dalam *Website* Pemerintah Daerah (Y). Publikasi Laporan Keuangan dalam *Website* adalah aksesibilitas laporan keuangan yang mempunyai hubungan dengan kemudahan pihak pengguna untuk menemukan sebuah informasi keuangan yang telah disediakan dan diungkapkan melalui media internet (Putri dan Setiawan, 2022). Untuk mengukur Publikasi Laporan Keuangan dalam *Website* adalah dengan menyesuaikannya pada informasi yang tertera dalam Intruksi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) No. 18852/1797/SJ mengenai panduan penyusunan laporan anggaran oleh pemerintah daerah yang bersifat jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mekanisme peraturan yang dari Mendagri yang mana tercantum di situs resmi masing-masing pemerintah daerah mencakup 12 poin untuk setiap wilayah. Elemen yang diukur adalah sebagai berikut :

1. Rangkuman RKA SKPD
2. Rangkuman RKA PPKD
3. Rancangan Peraturan Daerah
4. Rancangan Peraturan Daerah perubahan APBD
5. Peraturan Daerah APBD
6. Peraturan Daerah Perubahan APBD
7. Rangkuman DPA SKPD
8. Rangkuman DPA PPKD
9. LRA SKPD
10. LRA PPKD
11. LKPD yang sudah diaudit
12. Opini pada Badan Pemeriksa Keuangan atau (BPK)

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menganalisis pengukuran variabel dependen yang akan diuji:

$$PLK = \frac{\sum \text{SCORE}}{\text{Max (12)}}$$

Dimana:

\sum score : Nilai setiap elemen

Max : Maksimum nilai elemen pengungkapan

3.5.2. Variabel Independen (X)

Variabel independen atau variabel bebas adalah jenis variabel yang berfungsi sebagai penggerak dalam suatu penelitian yang mana secara komprehensif menjadi penyebab adanya variabel terikat (Purwanza, 2022).

Pada penelitian ini menggunakan beberapa variabel independen yaitu sebagai berikut:

3.5.2.1. Kompetisi Politik

Kompetisi politik adalah skala tingkatan daya saing untuk masuk ke dalam sebuah jabatan di kursi pemerintahan (Nurhunan et al., 2023). Terjadinya kompetisi politik menimbulkan dampak kepada pejabat untuk berbondong-bondong berupaya memberikan hasil kinerjanya dengan mengungkapkan laporan keuangan untuk merepresentasikan hasil kerja dan janji saat pemilu. Untuk mengukur variabel kompetisi politik pada penelitian yaitu berdasarkan jumlah kandidat kepala daerah pada pemilihan umum kepala daerah terakhir yang dilaksanakan di wilayah tersebut. tersebut (Yunita, 2021). Dalam perhitungan kompetisi politik menggunakan rumus yaitu sebagai berikut:

$$\text{KP} = \text{Jumlah Kandidat Calon Kepala Daerah}$$

3.5.2.2. Belanja Daerah

Pengeluaran daerah adalah tanggung jawab yang diakui sebagai pengurangan nilai aset secara bersih pemerintah daerah selama periode tahun anggaran yang relevan (Saraswati et al., 2019). Pengukuran pada variabel belanja daerah yaitu dengan menggunakan realisasi belanja langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang mana secara lebih lanjut kemudian raihan perolehan data-data tersebut di logaritma karena jumlah data realisasi belanja daerah mencapai nilai

ratusan hingga miliaran rupiah. Rumusan guna menghitung pengeluaran belanja daerah dilakukan dengan cara berikut ini, antara lain sebagai berikut:

$$\mathbf{BD = Realisasi Belanja Langsung + Realisasi Belanja Tak Langsung}$$

3.5.2.3. Ukuran Pemerintah

Ukuran pemerintah merupakan suatu skala untuk mempresentasikan kondisi seberapa besar keadaan suatu pemerintah daerah (Masra dan Sari, 2020). Ukuran pemerintah daerah mendeskripsikan besar kecilnya pemerintahan dan difungsikan sebagai pengganti data dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Studi ini memanfaatkan Logaritma Natural (LN) untuk mengurangi fluktuasi pada nominal yang jumlahnya jutaan hingga miliaran. Rumus untuk menganalisis ukuran pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{Size = LN Total Aset}$$

Dimana:

Size : Ukuran Pemerintah Daerah

LN : *Natural Logaritma*

Tabel definisi operasional variabel

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Definis secara Konsep	Indikator/Kriteria	Sumber yang didapat
1	Publikasi Laporan Keuangan dalam Website Pemerintah Daerah (Y)	Publikasi Laporan Keuangan dalam Website adalah aksesibilitas laporan keuangan yang mempunyai hubungan dengan kemudahan pihak pengguna untuk menemukan sebuah informasi keuangan yang telah disediakan dan diungkapkan melalui media internet.	Untuk mengukur Publikasi Laporan Keuangan dalam Website adalah dengan menyesuaikan pada informasi yang tertera dalam Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ. Instruksi Mendagri tersebut pada situs resmi masing-masing pemda terdapat 12 poin untuk setiap daerah. Rumus yang digunakan: $PLK = \frac{\sum \text{SCORE}}{\text{Max (12)}}$	(Putri dan Setiawan, 2022)

2	Kompetisi Politik	<p>Kompetisi politik adalah skala tingkat daya saing untuk mengisi suatu jabatan penting pada kursi pemerintahan yang menimbulkan dampak kepada pejabat untuk berbondong-bondong berupaya memberikan hasil kinerjanya dengan mengungkapkan laporan keuangan untuk merepresentasikan hasil kerja.</p>	<p>Pengukuran: $KP = \text{Jumlah Kandidat Calon Kepala Daerah}$</p>	(Nurhunan et al., 2023)
3	Belanja Daerah	<p>Belanja daerah adalah segala kewajiban daerah yang telah diakui</p>	<p>Pengukuran: $BD = \text{Realisasi Belanja Langsung} +$</p>	(Saraswati et al., 2019)

		<p>sebagai nilai pengurangan kekayaan bersih pemerintah daerah pada periode tahun anggaran pada tahun yang bersangkutan.</p> <p>(Saraswati et al., 2019)</p>	<p>Realisasi Belanja Tak Langsung</p>	
4	<p>Ukuran Pemerintah</p>	<p>Ukuran pemerintah merupakan suatu skala untuk mempresentasikan kondisi seberapa besar keadaan suatu pemerintah daerah.</p>	<p>Pengukuran:</p> $Size = LN \frac{Total \ Aset}{Pemerintah \ Daerah}$ <p>Dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Size : Ukuran Pemerintah Daerah - LN : Natural Logaritma 	<p>(Masra dan Sari, 2020).</p>

3.6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian akan dianalisis dan diuji dengan menggunakan berbagai alat statistik, dengan menerapkan statistik deskriptif dan analisis regresi berganda dilakukan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*).

3.6.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berfungsi untuk menganalisis informasi dengan menyajikan gambaran mengenai data yang telah dihimpun, tanpa niatan untuk menarik kesimpulan secara umum (Sugiyono, 2019). Statistik deskriptif digunakan untuk memahami seberapa kuat hubungan antar variabel yang dianalisis melalui analisis korelasi, untuk melakukan prediksi dengan analisis regresi, sementara perbandingan dilakukan dengan membandingkan rata-rata populasi atau sampel yang ada. Studi ini memanfaatkan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan pemerintah Jawa Tengah pada tahun anggaran 2022 kemudian diaudit oleh BPK.

3.6.2. Uji Asumsi Klasik

Jika model regresi linear berganda diterima dalam konteks ekonometrika dan memenuhi kriteria Best Linear Unbiased Estimator (BLUE), maka selanjutnya adalah dilakukan uji asumsi klasik. BLUE mengarah pada kondisi klasik yang harus dipenuhi guna proses statistik regresi dengan tujuan memberikan interpretasi terhadap hasil analisis regresi (Asteria, 2015).

3.6.2.1. Uji Normalitas

Metode ini digunakan untuk mengevaluasi apakah distribusi data yang telah dikumpulkan bersifat normal atau tidak. Pengujian sampel untuk mengevaluasi normalitas dilakukan dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov yang mana dengan memiliki tingkat kepercayaan (a) sebesar 5% (Prayitno, 2010 dalam Ulya dan Astuti, 2018). Kriteria pengujian metode kolmogorov-smirnov yaitu:

- a. Bilamana terdapat nilai signifikansi $> 0,05$, maka data berdistribusi normal
- b. Bilamana terkait kedapatannya nilai signifikansi $< 0,05$, maka data tidak berdistribusi normal

3.6.2.2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah suatu keadaan di mana terdapat adanya sebuah hubungan linear yang sempurna atau hampir sempurna antar variabel independen dalam suatu model regresi. Multikolinearitas dalam analisis regresi muncul ketika ada hubungan linear yang sempurna antara satu atau lebih variabel independen dalam model linear (Mardiatmoko, 2020). Dalam penelitian ini, pengujian multikolinearitas dilakukan dengan memanfaatkan nilai toleransi dan Faktor Inflasi Varian (VIF). Tingkat toleransi dan faktor inflasi variabel (VIF) yang mana peneliti jadikan acuan atau yang digunakan adalah sebagai berikut ini :

- Bilamana didapati hasil *tolerance* $< 0,10$ *VIF* > 10 , maka situasi pada hal tersebut telah terjadi sebuah mekanisme multikolinearitas
- Bilamana didapati hasil *tolerance* $> 0,10$ *VIF* < 10 , maka situasi pada hal tersebut tidak terjadi sebuah mekanisme multikolinearitas

3.6.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas ini mengacu pada situasi di mana variasi residual tidak seragam di seluruh dataset dalam suatu model regresi (Mardiatmoko, 2020). Metode pengujian ini melibatkan penggunaan uji Glejser, yang dilakukan dengan meregresikan variabel bebas terhadap nilai absolut residual. Pengambilan keputusan pada pengujian Glejser yaitu:

- Bilamana didapati nilai signifikan $> 0,05$, maka situasi pada hal ini tidak terjadi mekanisme heteroskedastisitas
- Bilamana didapati nilai signifikan $< 0,05$, maka situasi pada hal semacam ini terjadi mekanisme heteroskedastisitas

3.6.3. Analisis Linear Berganda

Guna untuk menentukan serta melihat jumlah apakah akan terdapat pengaruh pada antar variabel dan melihat sejauh mana variabel terikat dapat mempengaruhi variabel bebas maka digunakan analisis linear berganda. Adapun variabel bebas didapati berupa aspek-aspek yang menjadi perhatian dalam penelitian ini meliputi persaingan politik atau kompetisi politik, belanja daerah, dan ukuran pemerintah daerah. Selain itu, terdapat satu variabel dependen yang diidentifikasi, yaitu publikasi laporan keuangan

dalam *website* pada pemerintah daerah. Regresi berganda dapat dinyatakan dengan persamaan di bawah ini. :

$$PLK = a + b1.KP + b2.BD + b3.UP + e$$

Keterangan:

PLK : Publikasi laporan keuangan dalam *website*

KP : Kompetisi Politik

BD : Belanja daerah

UP : Ukuran pemerintah

a : Konstanta

b1, b2, b3 : Koefisien regresi yang mana terletak pada masing-masing variabel independen

e : Term Error yang didapati atau diperoleh

3.6.4. Uji Goodness of Fit

Uji Kecocokan digunakan untuk mengetahui apakah distribusi dari sampel sesuai dengan distribusi yang diharapkan secara teori atau tidak. Yang mana uji ini digunakan dengan melakukan perbandingan antara distribusi data teoritis dengan data aktual (Abdullah, 2015)

3.6.4.1. Uji F

Uji F bertujuan untuk menunjukkan apakah variabel independen secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang diterapkan dalam pengujian ini adalah 5% atau 0,05. Jika hasil uji F menunjukkan signifikansi lebih besar dari 0,05, maka regresi tersebut dianggap valid untuk diuji. Hal ini berarti variabel

independen secara bersamaan mampu menjelaskan variabel dependen dalam sebuah fenomena penelitian termasuk penelitian ini, yang sedang melalui kajian peneliti saat ini.

3.6.4.2. Uji Koefisien determinasi (R^2)

Uji Determinasi berfungsi untuk mengukur seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinan memiliki nilai yang berkisar antara 0 hingga 1 ($0 < R^2 < 1$) sehingga hal ini sangat penting untuk disertakan yang mana kondisi ini mampu menerangkan bahwa nilai R^2 yang semakin tinggi atau sebuah regresi yang memiliki nilai mendekati 1 maka akan semakin baik regresi yang dihasilkan.

3.6.5. Pengujian Hipotesis

3.6.5.1. Uji t

Salah satu teknik uji paling penting lainnya yakni uji T, uji T ini mampu digunakan pada situasi untuk mengevaluasi keterkaitan dan pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat (Masra dan Sari, 2020). Dalam penelitian ini menggunakan nilai kepercayaan sebesar 95% maka alpha sebesar 5%. Dalam pengujian ini apabila nilai signifikansi uji $t < 0,05$, maka ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat dan hipotesis diterima. Tetapi jika nilai signifikansi uji $t > 0,05$, maka tidak ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat serta hipotesis ditolak.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pendekatan dan jenis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan bersifat sekunder. Data sekunder yang dijadikan acuan dari adanya penelitian ini adalah berupa data yang digunakan yakni laporan keuangan dari pemerintah daerah (LKPD) dan objek penelitian pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Informasi dan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengamatan terhadap situs resmi pemerintah daerah selama tahun 2022. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menerapkan teknik *purposive sampling*, seperti yang telah peneliti himpun dan berhasil secara sistematis dijelaskan pada bab sebelumnya, yang dimana data tersebut diambil dan disaring dengan didasarkan pada ketentuan yang sudah ditetapkan. Dengan menggunakan metode ini didapatkan 33 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Kriteria pengambilam sampel tersebut telah disajikan dalam tabel di bawah berikut, antara lain :

Tabel 4. 1 Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian

Kriteria Sampel	Jumlah Sampel
Pemerintahan pada wilayah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi tepatnya di daerah Jawa Tengah.	35
Dikurangi:	
Pemerintah daerah yang mana wilayahnya belum mempunyai website yang secara resmi atau tidak dapat diakses. Atau,	2

Pemerintah daerah yang tidak menyampaikan laporan mengenai realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah serta neraca yang telah diaudit dalam periode tahun 2022 di <i>website</i> . Atau,	
Pemerintah daerah yang tidak memiliki data statistik yang komprehensif tentang kewajiban dan aset. Atau,	
Pemerintah daerah yang tidak memiliki informasi mengenai persaingan politik, khususnya jumlah calon kepala daerah pada pemilihan umum kepala daerah terakhir yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).	
Total Sampel	33

Sumber: data sekunder dioah, 2024

Tabel diatas menerangkan jumlah populasi pada penelitian ini sebanyak 35 Pemda dan telah disaring berdasarkan kriteria sehingga diperoleh sebanyak 33 sampel yang digunakan. Terdapat 2 sampel yang datanya tidak dipublikasikan dalam website resmi Pemda sehingga ketentuan untuk sampel dalam penelitian ini tidak terpenuhi. 2 sampel tersebut terdiri dari laporan keuangan periode 2022 pada kabupaten demak dan kabupaten banyumas.

4.2. Pengujian dan Hasil Analisis data

4.2.1. Analisis Statistik Secara Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara memberikan visualisasi atau uraian mengenai data pada variabel penelitian yang telah dikumpulkan, tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang bersifat umum. Uraian dilakukan dengan pendekatan deskriptif dengan menganalisis nilai terendah, tertinggi, rata-rata (mean), serta deviasi standar (Sugiyono, 2019). Variabel tersebut merupakan sebuah variabel jenis terikat berupa Publikasi Laporan Keuangan dalam Website Pemerintahan Daerah (Y), dan variabel bebas berupa Kompetisi Politik (X1), Belanja Daerah

(X2), dan Ukuran Pemerintah (X3). Hasil uji ststistik deskriptif dari 33 data observasi website pemerintah daerah adalah sebagaimana berikut ini, yakni:

Tabel 4. 2 Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Nilai Minimum	Nilai Maximum	Rata-Rata hasil	Std. Deviation
Kompetisi Politik	33	1	5	2,33	1,021
Belanja Daerah	33	27,560675	29,214515	28,40555548	,343272206
Ukuran Pemerintah	33	28,561959	30,743109	29,12201639	,440421451
Publikasi Laporan Keuangan	33	,250	1,000	,80051	,206176
Valid N (listwise)	33				

Sumber: Output SPSS halaman 116

Menurut tabel 4.2 analisis statistik deskriptif yang ditampilkan di atas menunjukkan bahwasanya beberapa hal terkait, antara lain yaitu:

1. Variabel kompetisi politik pada tabel diatas menerangkan bahwa variabel dengan 33 titik data yaitu sampel pada tahun 2022 dengan jumlah data yang dikonsumsi, menerangkan nilai terkecil (minimum) sebesar 1 dan nilai terbesar (maximum) sebesar 5. Kompetisi politik terendah berada di Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Pati, dan Kota Semarang. Sedangkan kompetisi politik tertinggi berada di Kabupaten Kudus dan Kota Tegal. Rata-rata kompetisi politik pemerintah daerah pada 33 kabupaten/kota yang diteliti adalah sebesar 2,33 dengan standar deviasi sebesar 1,021. Temuan

ini menerangkan bahwa nilai mean melebihi nilai standar deviasi, sehingga memperlihatkan bahwa data tersebar merata dan memperlihatkan kualitas data yang baik.

2. Variabel belanja daerah adalah hasil dari logaritma natural pada hasil total belanja daerah pada masing-masing pemerintah daerah yang diteliti. Berdasarkan tabel diatas variabel belanja daerah dengan 33 titik data pada sampel tahun 2022 yang dikonsumsi, menerangkan nilai terkecil (minimum) sebesar 27,560675 atau Rp. 932.071.471.274 (Kota Salatiga) dan nilai maksimum sebesar 29,214515 atau Rp. 4.871.946.697.040 (Kota Semarang). Sedangkan rata-rata belanja daerah pemerintah daerah pada 33 kabupaten/kota yang diteliti adalah sebesar 28,40555548 atau Rp. 2.169.581.656.776 dengan standar deviasi sebesar 0,343272206. Temuan ini menerangkan bahwa nilai mean melebihi nilai standar deviasi, sehingga memperlihatkan bahwa data tersebar merata dan memperlihatkan kualitas data yang baik.
3. Variabel ukuran pemerintah adalah bagian hasil yang telah didapati atas raihan melalui serangkaian penggunaan dari logaritma natural pada hasil total aset pada masing-masing pemerintah daerah yang diteliti. Berdasarkan tabel diatas variabel ukuran pemerintah dengan 33 titik data pada sampel tahun 2022 yang dikonsumsi, menerangkan nilai terkecil (minimum) sebesar 28,561959 atau Rp. 2.536.886.700.325 (Kota Tegal) dan nilai maksimum sebesar 30,743109 atau Rp. 22.467.914.775.459 (Kota Semarang). Sedangkan rata-rata total aset pemerintah daerah pada 33

kabupaten/kota yang diteliti adalah sebesar 29,12201639 atau Rp. 4.441.513.843.483 dengan standar deviasi sebesar 0,440421451. Temuan ini menerangkan bahwa nilai mean melebihi nilai standar deviasi, sehingga memperlihatkan bahwa data tersebar merata dan memperlihatkan kualitas data yang baik.

4. Variabel Publikasi Laporan Keuangan pada tabel diatas menerangkan bahwa variabel dengan 33 titik data yaitu sampel pada tahun 2022 dengan jumlah data yang dikonsumsi, menerangkan nilai paling kecil yaitu 0,250 dan nilai paling besar yaitu 1,00. Publikasi dokumen laporan keuangan pada *website* pemda yang dipublikasi paling sedikit berada di Kabupaten Pekalongan. Sedangkan dokumen yang dipublikasi paling banyak berada di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, Kabupaten Kendal, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal. Rata-rata frekuensi publikasi laporan keuangan daerah di 33 kabupaten/kota yang dianalisis adalah 0,8005. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintahan daerah di Jawa Tengah menampilkan laporan keuangannya di situs web mereka secara resmi sehingga didapati hasil yang mempunyai nilai rata-rata dokumen yang di publikasi sebanyak 9 dokumen dan nilai deviasi standar mencapai 0,206176. Penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai lebih tinggi dibandingkan dengan nilai deviasi standar, yang mengindikasikan bahwa didapatkan data tersebut mampu tersebar merata dan memperlihatkan kualitas data dengan mutu yang telah baik.

4.2.2. Uji Asumsi Klasik

Guna mengetahui dan melihat bahwa data dan instrumen yang telah didapatkan melalui proses komprehensif pada penelitian yang dikaji ini memenuhi standar dan kriteria model regresi berkualitas tinggi, sehingga hubungan yang signifikan akan terlihat jelas didalamnya maka dalam penelitian ini dilakukan sebuah uji secara asumsi klasik, antara lain, terdapat uji model normalitas, uji model multikolinearitas, dan uji model heteroskedastisitas secara sistematis.

4.2.2.1. Uji Normalitas

Uji ini dirancang untuk menguji dan mengetahui apakah pada sampel yang digunakan pada model regresi, dengan keadaan nilai residualnya terdistribusi dengan normal atau tidak. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov (1-sample K-S), yang menunjukkan bahwa data dianggap terdistribusi normal jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 atau 5%. (Prayitno, 2010 dalam Ulya dan Astuti, 2018). Di bawah ini disampaikan pembahasan terkait hasil dari pengujian normalitas yang tertera pada tabel berikut, antara lain yakni :

Tabel 4. 3 Hasil Uji Kolmogorov-smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		33
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,18435955

Most Extreme Differences	Absolute	,104
	Positive	,066
	Negative	-,104
Test Statistic		,104
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{e,d}

Sumber: Data olah pribadi dari Output SPSS halaman 116

Tabel yang telah disajikan dan didapatkan diatas merupakan tabel komprehensif dengan informasi terkait uji secara normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov pada model regresi linier yang melibatkan variabel kompetisi politik, belanja daerah, dan ukuran pemerintah terhadap publikasi laporan keuangan di situs web pemerintah daerah, menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200 dimana nilai tersebut lebih besar dari 5% atau 0,05. Dengan nilai sig > 0,05 berarti uji tersebut menyatakan bahwa pada penelitian ini data berdistribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi.

4.2.2.2. Uji Multikolinearitas

Pengujian Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel dalam model regresi berkorelasi satu sama lain. Dalam kebanyakan kasus, model regresi dianggap baik jika tidak ada korelasi antara variabel independen. Nilai toleransi dan faktor inflasi variasi (VIF) digunakan untuk menganalisis gejala multikolinearitas. Penelitian ini tidak menemukan gejala multikolinearitas jika nilai toleransi > 0,1 dan VIF < 10. Tabel berikut menunjukkan hasil uji multikolinearitas yang telah peneliti hasilkan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4. 4 Hasil Uji multikolinearitas

Coefficients ^a			
Keterangan		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kompetisi Politik	,873	1,145
	Belanja Daerah	,749	1,335
	Ukuran Pemerintahan	,692	1,444
a. Variable Dependent: Publikasi Laporan Keuangan			

Sumber: Hasil olah data peneliti, Output SPSS halaman 116

Tabel 4.4 di atas menunjukkan hasil analisis uji multikolinearitas. Variabel Kompetisi Politik (X1) memiliki nilai toleransi sebesar 0,873 dan nilai VIF sebesar 1,145. Selanjutnya, variabel Belanja Daerah (X2) memiliki nilai toleransi sebesar 0,749 dan nilai VIF sebesar 1,335. Ukuran Pemerintah (X3) memiliki nilai tolerance sebesar 0,692 dan nilai VIF sebesar 1,444. Dengan demikian nilai tolerance pada semua variabel independen lebih besar dari 0,1. Sedangkan nilai VIF semua variabel independen dibawah 10. Maka pada pengujian ini dapat dinyatakan bahwa model terbebas dari gejala multikolinearitas antar sesama variabel independen dalam model regresi.

4.2.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Pada penelitian yang telah luwes dikaji ini menggunakan uji heteroskedastisitas untuk mengetahui apakah model regresi memiliki ketidaksamaan dalam varians residual yang mana semua observasi yang dilakukan. Pada penelitian ini untuk memastikan gejala heteroskedastisitas selanjutnya, uji Glejser digunakan untuk meregresikan nilai absolut dari variabel bebas residual. Heteroskedastisitas dianggap tidak bermasalah jika

nilai absolut residual tidak menunjukkan pola tertentu dan variabel bebas nilai signifikansinya pada hasil uji heteroskedastisitas ditunjukkan dalam tabel berikut, yang lebih besar dari 0,05 atau 5%. Antara lain sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Hasil Uji Glejser

Coefficients ^a		
Keterangan		Sig.
1	(Constant)	,584
	Kompetisi Politik	,222
	Belanja Daerah	,584
	Ukuran Pemerintah	,244
a. Variable Dependent : ABRESID		

Sumber: Olah data pribadi peneliti, Output SPSS halaman 117

Hasil analisis uji ditunjukkan dalam Tabel 4.5 didapati hasil uji model heteroskedastisitas menggunakan Uji Glejser memiliki nilai signifikansi untuk variabel Kompetisi Politik (X1) adalah 0,222, variabel Belanja Daerah (X2) sebesar 0,584, dan variabel ukuran pemerintah (X3) sebesar 0,244. Sehingga dijelaskan bahwa penelitian ini tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas, dengan nilai signifikansi masing-masing variabel independen lebih dari 0,05. Akibatnya, data penelitian ini dianggap baik karena tidak mengandung masalah heteroskedastisitas.

4.2.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Tujuan dari analisis regresi ini adalah untuk mengetahui apakah variabel satu dan variabel lainnya saling berpengaruh dan melihat sejauh

mana keterkaitan antar variabel tersebut. Pengujian ini menggunakan tiga variabel bebas, yaitu kompetisi politik, belanja daerah, dan ukuran pemerintah, serta satu variabel yakni publikasi laporan keuangan di situs web pemerintah daerah yang digunakan sebagai variabel terikat. Tabel berikut menunjukkan hasil dari analisis regresi linier berganda, antara lain:

Tabel 4. 6 Hasil Analisis Regresi

Coefficients ^a					
Keterangan		Unstandardized Coefficients		t value	Significant.
		B	Std Error.		
1	(Constant)	2,905	3,181	,913	,369
	Kompetisi Politik	,071	,036	1,966	,059
	Belanja Daerah	-,196	,115	-1,699	,100
	Ukuran Pemerintah	,113	,093	1,209	,236

a. Variable Dependent: Publikasi Laporan data pada Keuangan

Sumber: Olah data pribadi peneliti, Output SPSS halaman 117

Berdasarkan tabel 4.6 persamaan regresi yang dihasilkan yaitu:

$$PLK = 2,905 + 0,71 KP - 0,196 BD + 0,113 UP + e$$

Keterangan:

PLK : Publikasi Laporan Keuangan

KP : Kompetisi Politik

BD : Belanja Daerah

UP : Ukuran Pemerintah

Persamaan di atas dapat digunakan untuk menghasilkan analisis sebagai berikut :

1. Nilai yang didapati terkait konstanta (a) menerangkan nilai sebesar 2,905 dan nilai sig 0,369 (>5%) yang menyatakan bahwa, jika variabel kompetisi politik, belanja daerah, dan ukuran pemerintah dianggap konstan, maka publikasi laporan keuangan pada *website* pemerintah daerah adalah sebesar 290,5%.
2. Nilai pada bagian koefisien regresi kompetisi politik didapati perolehan angka mencapai 0,71 yang bernilai positif dan memiliki nilai sig 0,059 (> 5%) dapat diartikan bahwa semakin banyak jumlah calon kandidat pada kompetisi politik maka publikasi laporan keuangan di situs web pemerintah daerah akan meningkat sebesar 7,1%. Ini menunjukkan bahwa kompetisi politik tidak memiliki pengaruh terhadap publikasi laporan keuangan melalui situs *web* pemerintah daerah secara signifikan.
3. Nilai dari angka koefisien regresi untuk belanja daerah adalah -0,196 yang bernilai negatif dan memiliki nilai signifikansi 0,100 (> 5%). Ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja daerah oleh pemerintah daerah akan menyebabkan penurunan publikasi laporan keuangan di situs *web* pemerintah daerah sebesar raihan angka mencapai persentase 19,6%. Dengan kata lain, belanja daerah tidak mempengaruhi publikasi laporan keuangan di situs web pemerintah daerah secara signifikan.

4. Nilai pada angka koefisien regresi untuk ukuran pemerintah adalah mencapai 0,113 yang mempunyai nilai positif dengan adanya raihan nilai signifikansi 0,236 ($> 5\%$). Hal ini berarti bahwa peningkatan totalan dari segenap aset yang telah di kelola maupun telah dimiliki oleh pemerintah daerah itu sendiri akan mengakibatkan peningkatan publikasi laporan keuangan di situs *web* pemerintah daerah sebesar 11,3%. Dengan demikian, ukuran pemerintah tidak memberikan pengaruh yang secara aktif memiliki signifikansi terhadap publikasi laporan keuangan di situs *web* pemerintah daerah tersebut.

4.2.4. Uji *Goodness of Fit*

Uji *Goodness of Fit* berupa membandingkan dua distribusi data, yaitu data sesuai kenyataan dan data teoritis untuk mengetahui apakah pendistribusian sampel mengikuti distribusi teoritis dan tidaknya. (Abdullah, 2015).

4.2.4.1. Uji F

Uji F ini bertujuan guna menentukan akankah dari semua komponen variabel jenis independen tersebut mampu bersama-sama secara aktif dan simultan memengaruhi variabel jenis dependen. Kajian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%, atau 0,05. Nilai signifikansi kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel independen memengaruhi variabel dependen secara signifikan. Tabel berikut menunjukkan hasil uji F yang telah peneliti himpun, antara lain :

Tabel 4. 7 Hasil Uji F

ANOVA ^a			
Keterangan		F value	Significant
1	Regresion	2,423	,086 ^b
	Residual		
	Total		
a. Variable Dependent: Publikasi Laporan Keuangan			
b. Predictors: (Constant), Kompetisi Politik, Belanja Daerah, Ukuran Pemerintah			

Sumber: Olah data pribadi peneliti, Output SPSS halaman 117

Menurut tabel tersebut didapatkan nilai dari F hitung yang mana didapati hasil dengan nilai F sebesar 2,423 dan tingkat signifikansi sebesar 0,086. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi 0,086 lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa kombinasi faktor kompetisi politik, belanja daerah, dan ukuran pemerintah daerah tidak mempengaruhi publikasi laporan keuangan di situs web pemerintah daerah secara bersama-sama.

4.2.4.2. Uji Koefisien determinan (R^2)

Uji koefisien determinasi ini digunakan untuk mengevaluasi potensi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji ini tentukan untuk mengukur sejauh mana model dapat menjelaskan variabel yang terikat. Koefisien determinan berkisaran nilai antara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$), yang mana menerangkan bahwa nilai R^2 yang semakin tinggi sebuah regresi yang memiliki nilai mendekati 1. Jadi, hasil regresi akan baik karena memiliki hasil mendekati 1, dan menyimpulkan bahwa kemampuan model regresi variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel

dependen meningkat jika nilai koefisien determinasi mendekati nilai tersebut. Hasil uji koefisien determinasi pada tabel berikut disajikan di bawah ini sebagai berikut :

Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimated	Durbin-Watson
1	,448 ^a	,200	,118	,1936608	1,568
a. Predictors: (Constant), Kompetisi Politik, Belanja Daerah, Ukuran Pemerintah					
b. Variable Dependent: Publikasi Laporan Keuangan					

Sumber: Output SPSS halaman 117

Tabel yang telah peneliti sajikan diatas menerangkan nilai dari adanya Adjustedd-R Square sebesar raihan angka 0,118 atau 11,8%, hal tersebut dapat diartikan bahwa terdapat dampak kompetisi politik, belanja daerah, dan ukuran pemerintah sebesar 11,8% pada publikasi laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah. Sedangkan 88.2% lainnya didampaki oleh variabel bebas lainnya yang tidak digunakan sebagai model terkhusus melalui mekanisme dalam adanya penelitian yang peneliti sedang kaji ini.

4.2.5. Pengujian Hipotesis

4.2.4.3. Uji t

Dalam penelitian ini, uji t atau uji parsial bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen secara parsial. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk

mengidentifikasi hubungan dan efek antara variabel bebas dan variabel terikat. Uji ini memiliki tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Nilai signifikansi $t < 0,05$ menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat, dan sebaliknya. Tabel berikut menunjukkan hasil uji t yang telah peneliti himpun, antara lain sebagai berikut ini :

Tabel 4. 9 Hasil Uji t

Keterangan	Sig.	Keputusan
Kompetisi Politik terhadap Publikasi Laporan Keuangan	,059	Ha ditolak/Ho diterima
Belanja Daerah Publikasi Laporan Keuangan	,100	Ha ditolak/Ho diterima
Ukuran Pemerintah Publikasi Laporan Keuangan	,236	Ha ditolak/Ho diterima

Berdasarkan tabel sebelumnya yaitu tabel 4.6 dan tabel dengan kode data 4.9 diatas, didapati raihan pengujian hipotesis model t, yaitu sebagai berikut ini :

1. Pengaruh kompetisi politik terhadap publikasi laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah

Nilai dari jenis koefisien model regresi diuji dan hasilnya menerangkan arah positif (+) sebesar 0,071 dan didapatkan nilai t hitung sebesar 1,966 yang mana value signifikansi $0,59 > 0,05$. Dengan demikian, Ha ditolak dan Ho diterima. Hal ini menunjukkan bahwa publikasi laporan keuangan di situs web pemerintah daerah tidak dipengaruhi oleh persaingan kompetisi politik pada setiap daerah di Provinsi Jawa Tengah.

2. Pengaruh belanja daerah terhadap publikasi laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah

Nilai koefisien regresi diuji dan hasilnya menerangkan arah negatif (-) sebesar -0,196 dan didapatkan nilai t jenis hitung didapati angka sebesar -1,699 dengan value aktif signifikansi $0,100 > 0,05$. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa H_a telah ditolak dan H_o diterima. Hal tersebut menggambarkan bahwa belanja daerah tidak memberikan pengaruh terhadap adanya publikasi laporan keuangan dalam *website* pemerintah melalui pemerintah daerah tersebut.

3. Pengaruh ukuran pemerintah terhadap publikasi laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah

Nilai koefisien regresi diuji dan hasilnya menerangkan arah positif (+) sebesar 0,113 dan didapatkan nilai t jenis hitung sebesar raihan angka 1,209 dengan nilai signifikansi 0,236 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, H_a ditolak dan H_o diterima. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah tidak mempengaruhi publikasi laporan keuangan di situs web pemerintah daerah tersebut.

4.3. Pembahasan hasil penelitian

Himbauan kepada pemerintah daerah untuk mengungkapkan laporan keuangan melalui situs web resmi mereka sesuai dengan Intruksi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) No. 188.52/1797/SJ tentang pedoman pelaporan anggaran oleh pemda yang transparan dan akuntabel. Dengan adanya instruksi yang tertulis tersebut pemerintah daerah harus

melaksanakan aturan guna mendukung pemerintahan yang terbuka dan dapat diakses semua pihak. Oleh karena itu penelitian ini mempunyai tujuan agar dapat mengungkapkan pengaruh kompetisi politik, belanja daerah, dan ukuran pemerintah terhadap publikasi laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah dengan studi kasus pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2022. Dari dilakukannya analisis data yang telah dikumpulkan dari website resmi masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, selanjutnya diolah dengan menggunakan SPSS Statistics 25 dengan metode analisis regresi berganda. Setelah dilakukan pengujian hipotesis, maka masing-masing variabel akan dijelaskan sebagai berikut:

4.3.1. Pengaruh Kompetisi Politik terhadap Publikasi Laporan Keuangan Dalam Website Pemerintah Daerah

Hipotesis alternatif 1 (H1) menerangkan kompetisi politik mempunyai efek positif pada publikasi laporan keuangan di situs *web* pemerintah daerah. Tetapi hasil pengujian memperlihatkan bahwa variabel kompetisi politik tidak berdampak pada publikasi laporan keuangan yang ditunjukkan dari hasil uji t (parsial). Menurut hasil uji didapatkan angka koefisien dengan arah positif 0,071, t hitung 1,966, dan tingkat signifikansi 0,59 yang lebih besar dari 0,05, dan hasil uji tersebut menyimpulkan bahwa H1 ditolak. Artinya, temuan penelitian menjelaskan bahwa **kompetisi politik tidak secara aktif memberikan pengaruh terhadap publikasi laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah.**

Penelitian ini menerangkan bahwa tidak ada kaitannya antara kompetisi politik dengan publikasi laporan keuangan, sehingga disimpulkan bahwa semakin banyaknya jumlah kandidat calon kepala daerah pada pilkada belum mampu memberikan sejumlah dampak dalam publikasi laporan keuangan pada suatu daerah. Yunita (2021) menyatakan bahwa pemda kabupaten/kota saat ini sedang gencar melakukan usaha dalam transparansi melalui publikasi laporan keuangan pada *website* tanpa mempertimbangkan kompetisi politik pada pilkada periode sebelumnya. Keputusan untuk mempublikasi LKPD pada website oleh Bupati/Walikota tidak bertujuan untuk memberikan rasa unjuk kinerjanya kepada lawan politik, tetapi lebih bertujuan untuk menepis adanya asimetri informasi antara pemerintah dan publik. Hal tersebut dikuatkan dengan Instruksi mengenai Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah dalam Instruksi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang mana peraturan tersebut sebenarnya dirancang dengan kepentingan agar dapat mendorong pemerintah daerah dalam hal penyampaian transparansi dari anggaran melalui *website* pemerintahan. Dengan adanya instruksi yang tertulis tersebut pemerintah daerah harus melaksanakan aturan guna mendukung pemerintahan yang terbuka dan semua pihak bisa mengaksesnya. Oleh karena itu tinggi atau rendahnya kompetisi politik, pemerintah tetap harus menjalankan peraturan tersebut sehingga tingkat kompetisi politik tidak mempunyai pengaruh atas keputusan untuk mempublikasikan laporan keuangan di *website* atau tidak. Penelitian ini

juga telah berusaha mengkonfirmasi temuan yang sesuai dengan penelitian Utami et al., (2017) dan Oktaviani & Arza (2020).

Studi ini telah berisikan konsepsi dan hasil yang mana selaras dengan teori keagenan, yang menyatakan bahwa pemerintah cenderung bertindak menurut keinginan mereka dengan mengabaikan janji pada saat pilkada, tetapi dengan adanya pengawasan melalui persaingan politik maka dapat menurunkan perilaku oportunistik tersebut. Apabila kompetisi politik suatu daerah memiliki tingkatan yang semakin tinggi maka semakin meningkat pula kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh informasi keuangan maupun non keuangan apabila tingkat kompetisi politik juga tinggi. Penyebab yang memungkinkan sebagai indikasi tidak memberikan pengaruhnya variabel kompetisi politik terhadap keteraksesan informasi adalah dikarenakan kompetisi politik dalam pilkada yang diselenggarakan oleh pemda di Provinsi Jawa Tengah masih kurang maksimal (Hanifah et al., 2017). Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan jumlah kandidat calon kepala daerah yang di beberapa Kabupaten/Kota masih tergolong rendah. Ada beberapa daerah yang calon kandidatnya melawan kotak kosong. Hanifah et al., (2017) menyebutkan bahwa keadaan kompetisi politik yang lemah dapat menyebabkan pemerintah daerah tidak termotivasi untuk melakukan transparansi dan kemudahan akses informasi keuangan daerah sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik dan pihak yang berkepentingan lainnya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Haddianto & Murrin (2020), Yunitaa (2021), Hanifah et al., (2017), Oktavia dan Aliyah (2022).

4.3.2. Pengaruh Belanja Daerah terhadap Publikasi Laporan Keuangan Dalam Website Pemerintah Daerah

Hipotesis alternatif 2 (H2) menyatakan bahwa belanja daerah mempunyai pengaruh negatif terhadap publikasi laporan keuangan dalam situs *web* pemerintah daerah. Yang mana Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel belanja daerah tidak berdampak pada publikasi laporan keuangan yang ditunjukkan dari hasil uji t (parsial). Berdasarkan hasil uji diperoleh nilai koefisien dengan arah negatif sebesar -0,196 dengan nilai t sebesar -1,669 dan tingkat signifikansi 0,100 lebih besar dari 0,05, dan hasil uji tersebut menyimpulkan bahwa H2 ditolak karena Dengan kata lain, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa **belanja daerah tidak mampu memberikan pengaruh atau efek terhadap publikasi laporan keuangan dalam *website* milik pemerintah daerah.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan belanja yang tinggi belum pasti akan mengungkapkan laporan keuangannya secara sukarela di situs *web*-nya. Hal ini dikarenakan belanja yang tinggi tidak selalu menunjukkan pelayanan yang baik, sehingga publikasi LKPD di situs *web* pemerintah daerah tidak dipengaruhi oleh variabel tersebut (Setiawan, 2019). Penelitian ini sejalan dan mendukung penelitian sebelumnya, yaitu pada penelitian Puspita & Martani (2013) dan penelitian Dezalinda & Afriyenti (2023).

Pemerintah daerah dengan nilai belanja daerah tertinggi yaitu Kota Semarang sebesar Rp 4.871.946.697.040 memiliki nilai publikasi laporan keuangan yang cukup rendah dengan nilai sebesar 0,75 dan Kabupaten Brebes dengan nilai belanja daerah tertinggi ketiga sebesar Rp 3.091.285.559.556 memiliki nilai publikasi laporan keuangan yang rendah yaitu sebesar 0,583. Sedangkan pemerintah daerah dengan nilai belanja daerah terendah yaitu Kota Magelang sebesar Rp 1.039.501.502.733 memiliki nilai publikasi laporan keuangan yang sangat tinggi yaitu sebesar 1 (maksimal) dan Kota Tegal sebagai pemda dengan nilai belanja daerah terendah kedua sebesar Rp 1.127.738.112.539 memiliki nilai publikasi laporan keuangan yang tinggi juga yaitu sebesar 1. Selanjutnya, pemda dengan nilai belanja daerah diatas rata-rata juga belum memiliki nilai publikasi laporan keuangan yang tinggi seperti Kab Kebumen, Kab Boyolali, Kab Wonogiri, Kab Sragen, Kab Semarang, dan Kab Pemasang. Dengan demikian semakin memperkuat alasan bahwa nominal belanja daerah yang tinggi belum tentu menjadi faktor untuk mendorong pemerintah mempublikasikan laporan keuangan secara sukarela dalam *website* resminya.

Belanja daerah termasuk dalam komponen anggaran dan diputuskan oleh kepala daerah kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing yang mana bertujuan untuk diimplementasikan maupun berusaha untuk dievaluasi, maka dari itu belanja daerah tidak mempunyai pengaruh apakah laporan keuangan akan dipublikasikan atau tidak (Yunita,

2021). Tubels dan Purwanti (2017) menyatakan bahwa alasan dari tidak terdapat pengaruh belanja daerah terhadap publikasi laporan keuangan adalah dikarenakan masih banyaknya pemda yang mengabaikan pentingnya pengungkapan informasi keuangan khususnya pada pengungkapan nominal belanja daerah.

Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang mana merupakan penelitian terdahulu dari Setiawan (2019), Yunita (2021), Tubels dan Purwanti (2017), Winangsih dan Fathah (2023).

4.3.3. Pengaruh Ukuran Pemerintah terhadap Publikasi Laporan Keuangan Dalam Website Pemerintah Daerah

Hipotesis alternatif 3 (H3) menerangkan Ukuran pemerintah daerah meningkatkan publikasi laporan keuangan di situs *web* pemerintah daerah. Namun, hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa variabel ukuran pemerintah tidak berdampak pada publikasi laporan keuangan. Uji yang telah dilakukan menghasilkan nilai koefisien dengan arah positif sebesar 0,113, nilai t hitung sebesar 1,209 dan tingkat signifikansi 0,236 lebih besar dari 0,05, maka H3 ditolak. Artinya temuan penelitian ini menerangkan bahwa **ukuran pemerintah tidak memberikan pengaruh terhadap publikasi pada laporan keuangan dalam *website* milik pemerintah daerah.**

Hasil yang didapati dari penelitian terdahulu oleh Lestari & Raharjo (2020) yaitu menyebutkan terkait adanya penyebab yang memungkinkan sebagai indikasi tidak memberikan pengaruhnya ukuran pemerintah pada pengungkapan LKPD dalam laman website resmi pemerintah adalah karena

jumlah aset yang dimiliki oleh pemda dengan nominal besar menyebabkan kualitas manajemen aset pemerintah seringkali buruk dan mendapatkan catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, pemda seringkali tidak memiliki informasi yang cukup tentang kasus-kasus yang sedang dihadapi, sehingga ukuran pemda tidak berdampak pada publikasi laporan keuangan di situs *web* daring milik pemerintah daerah tersebut.

Pemerintahan daerah yang memiliki banyak aset menunjukkan bahwa ukuran pemerintahan semakin besar, maka tentunya besar juga aset yang dimiliki daerah tersebut. Penelitian Hanafi dan Wadi (2021) menyebutkan bahwa nominal aset yang besar ini secara tidak langsung dapat menjadi kendala pemda dalam proses publikasi informasi keuangannya di media internet. Pemda akan semakin sulit dalam melakukan pengelolaan aset-aset daerah apabila nominal asetnya semakin besar. Hal demikian yang akan menyebabkan enggannya pemda melakukan pengungkapan informasinya dalam *website*-nya.

Sedangkan masyarakat yang mempunyai peran sebagai principal mempunyai kewajiban dalam berpartisipasi dalam penerimaan daerah, oleh karena itu meskipun pemerintah mengelola atau tidak mengelola aset dengan baik, pemerintah tetap akan memperoleh pendapatan yang merupakan salah satu komponen dari aset daerah itu sendiri. Maka apabila nilai aset yang dimiliki pemerintah menjadi lebih besar, tidak mendorong pemda untuk melakukan peningkatan dalam mengungkapkan laporan keuangannya diinternet (Makmum & Rahayu, 2018).

Penelitian tersebut tentunya telah memberikan hasil juga analisis yang sesuai dengan hasil output penelitian dari Makmum dan Rahayu (2018), Moehardiono dan Yuliati (2021), Mutiha (2020), Lestari dan Raharjo (2020), Tubels dan Purwanti (2016), Masra dan Sari (2020).



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Studi ini bertujuan untuk mempelajari dan menguji bagaimana kompetisi politik, belanja daerah, dan ukuran pemerintah daerah berdampak pada publikasi laporan keuangan dalam *website* pemda kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mana keberadaannya tersedia pada situs *web* masing-masing pemerintah daerah. Hasil pengujian dari semua hipotesis kemudian dirangkum sebagai berikut.

1. Kompetisi politik tersebut ternyata tidak menunjukkan pengaruh atau dampak yang aktif dan signifikan terhadap publikasi laporan keuangan di situs *web* pemerintah daerah pada tahun 2022, seperti yang terungkap dalam hasil uji yang telah dibahas sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa kompetisi pada politik, yang diukur berdasarkan jumlah kandidat peserta calon kepala daerah dari masing-masing pemerintah daerah, tidak berperan sebagai unsur-unsur yang mempengaruhi bagaimana laporan keuangan dipublikasikan di situs *web* pemerintah daerah.
2. Belanja pada jenis belanja daerah ternyata tidak menunjukkan pengaruh atau dampak yang aktif secara signifikan terhadap publikasi laporan keuangan pada situs *web* pemerintah wilayah atau daerah terkait data pada tahun 2022, sebagaimana terlihat dari hasil uji yang telah dibahas

sebelumnya. Ini menjelaskan bahwa belanja daerah yang diukur berdasarkan realisasi kegiatan belanja langsung dan tak langsung pemerintah daerah ternyata tidak terbukti mampu mempengaruhi publikasi laporan keuangan di situs *web* pemerintah daerah terkait.

3. Ukuran pemerintah daerah ternyata tidak menggambarkan perihal pengaruh atau dampak yang aktif secara signifikan terkait adanya kegiatan publikasi atau transparansi informasi keuangan dalam *web* pemerintah daerah dengan rentangan pada tahun 2022, seperti yang terlihat dari hasil uji yang telah dibahas sebelumnya. Ini mengindikasikan bahwasanya ukuran pemerintahan pada daerah, yang dihitung melalui model dan penelitian juga analisis aspek berdasarkan jumlah aset yang dimiliki, ternyata tidak memengaruhi publikasi laporan keuangan di situs *web* pemerintahan milik daerah tersebut.

5.2. Implikasi

5.2.1. Implikasi Teoritis

Studi ini menunjukkan bahwa faktor kompetisi politik tidak memengaruhi publikasi laporan keuangan di situs *web* pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah yang mana dilakukan selama periode 2022. Artinya hal ini menerangkan bahwa variabel kompetisi dalam uji hipotesis tidak mempunyai pengaruh pada publikasi laporan keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Variabel belanja daerah dan ukuran pemerintah juga tidak mempengaruhi publikasi laporan keuangan

pemerintah yang implementasinya terdapat maupun tertuang dalam website pemerintah di Provinsi Jawa Tengah.

5.2.2. Implikasi Praktis

Hasil dari adanya realisasi penelitian yang telah peneliti kaji ini tentunya dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah serta memotivasi pemda agar lebih meningkatkan pengembangan *website* pemerintah, karena media *website* atau situs daring tersebut sangatlah mampu membantu dalam upaya proses komunikasi antara pemerintahan daerah dan juga pada publik. Tujuannya adalah untuk meminimalisir asimetri informasi dan mengatasi semua bentuk kekhawatiran yang nantinya akan timbul terkait dengan publikasi laporan keuangan dalam *website* dan digunakan dalam pengelolaan setiap risiko yang mungkin akan timbul akibat adanya kekhawatiran tersebut.

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat manakala untuk kalangan pengguna laporan keuangan yakni sebagai sarana untuk menilai apakah pemerintah sudah mengelola keuangan dengan baik dan menyediakan informasi yang lugas mengenai keuangan pemerintah sehingga masyarakat merasa aman dalam adanya keterbukaan informasi.

5.3. Keterbatasan

Berikut ini berupa hal-hal yang menjadi kesulitan ataupun keterbatasan yang peneliti alami selama penyusunan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Adanya beberapa situs resmi pemerintah yang tidak dapat diakses, yang membuatnya sulit untuk memperoleh informasi keuangan maupun non-keuangan yang terdapat di dalamnya.
2. Karena penelitian ini tidak mencakup semua variabel independen, sehingga besar kemungkinan bahwa elemen tambahan variabel lainnya dapat digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian yang akan datang bagi peneliti lainnya yang serupa.
3. Sampel yang digunakan hanya dibatasi pada pemda di Provinsi Jawa Tengah dan diambil pada periode 2022 saja.
4. Nilai Adjusted R² masih berada pada tingkat rendah yaitu sebesar 11,8% yang menerangkan bahwa masih banyak faktor tambahan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak publikasi laporan keuangan.

5.4. Saran

Berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian, penulis dapat memberikan rekomendasi maupun saran untuk keberlangsungan penelitian selanjutnya atau yang akan datang, yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan bahwa penelitian lanjutan akan mampu dilakukan dengan meningkatkan jumlah populasi dan sampel yang dapat mempengaruhi variabel dependent dalam penelitian.
2. Untuk meningkatkan keakuratan hasil penulisan, diharapkan untuk menambahkan variabel independent yang berhubungan dengan publikasi laporan keuangan. Misalnya indeks pembangunan manusia, kekayaan daerah, maupun jumlah penduduk.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi*. In News.Ge (Issue August).
- Abdullah, P. M. (2015). *Living In The World That Is Fit For Habitation : Cci's Ecumenical And Religious Relationships*. In Aswaja Pressindo.
- Aggatha, N. P., Rahayu, S., & Inawati, W. A. (2023). The Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Opini Audit, Kompleksitas Pemerintah Dan Kekayaan Daerah Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan Pada Website Resmi Pemerintah Daerah Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2020. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 307–316. <https://doi.org/10.37676/ekombis.V11i1.2849>
- Alhajjriana, G. I., Nor, W., & Wijaya, R. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Internet Financial Reporting Pemerintah Daerah Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 17(2), 100. <https://doi.org/10.20961/jab.V17i2.226>
- Anggara Yunita, E. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Publikasi Informasi Keuangan Pada Website Resmi Pemerintah Daerah Se-Jawa Tengah. *Dialektika : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 6(1), 44–54. <https://doi.org/10.36636/dialektika.V6i1.486>
- Badruddin, Agustina, N., & Chyntia, E. (2019). Pengaruh Kemandirian Daerah, Tingkat Ketergantungan, Ukuran Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan*, 5, 29–40.
- Darmesta Hadianto, & Alek Murtin. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapaninternet Financial Reporting (Ifr) Di Indonesia. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(2), 33–45. <http://journal.umy.ac.id/index.php/ra>
- Hardiningsih, P., Srimindarti, C., Jannah, A., & Haryanto, M. Y. D. (2021). Digitalisasi Publikasi Laporan Keuangan Daerah. 19(1), 6.
- Kurniati, S., & Siddi, P. (2020). Pengaruh Kekayaan Daerah, Jenis Pemerintahan, Dan Kualitas Audit Terhadap Pengungkapan Internet-Based Financial Reporting. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.25273/inventory.V4i1.6295>
- Lesmanawati, D. (2019). Pengaruh Local Government Wealth , Intergovernmental

- Revenue Dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia Secara Online. *Infestasi : Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 15(2), 109–116.
- Mariasari, V. (2023). Pengaruh Kekayaan Daerah, Pendapatan Perkapita, Jumlah Penduduk, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 17(1), 110–134. <https://doi.org/10.25170/Jak.V17i1.3728>
- Masra, E. A., & Sari, V. F. (2020). Faktor Yang Mempengaruhi Internet Financial Reporting (Ifr) Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), 2757–2771. <https://doi.org/10.24036/Jea.V2i2.246>
- Moehardiono, I. A., & Yuliati, A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit Terhadap Internet Financial Reporting Pemerintah Kota/Kabupaten Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 12(03), 717–727.
- Mutiha, A. H. (2020). *The Effect Of Accessibility Of Internet Financial Reporting On E-Government Of Cities/Regencies In West Java*. 426(6), 96–103. <https://doi.org/10.2991/Assehr.K.200331.127>
- Nurhunah, S., Mulyadi, D., & Yanti. (2023). The Influence Of Regional Expenditure And Political Competition On Disclosure Of Internet Financial Reporting (Ifr) At Regencies/Cities In West Java. *Journal Of Economic, Business And Accounting*, 7(1), 2033–2048.
- Oktavia, W. T., & Aliyah, S. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah. *Among Makarti*, 15(2), 215–232. <https://doi.org/10.52353/Ama.V15i2.322>
- Poon, P. L., & Yu, Y. T. (2003). Internet Financial Reporting. *Information Systems Control Journal*, 1(December), 42–46.
- Puspita, R., & Martani, D. (2013). Analisa Pengaruh Kinerja Dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Dan Kualitas Informasi Dalam Website Pemda. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Putri, W., & Setiawan, M. A. (2022). Pengaruh Kekayaan Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Pengungkapan Internet Financial Reporting (Ifr) Pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(2), 438–448. <https://doi.org/10.24036/Jea.V4i2.482>
- Rizqa Puspita Nurhidayati Dan Sri Rahayu. (2020). Determinan Pengungkapan Lkpd Pada Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 3(2), 87–95. <https://doi.org/10.31629/Jiafi.V3i2.2224>
- Setiawan, D. (2019). Determinan Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan

Dalam Website Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Di Pulau Jawa Tahun 2017). *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung*, April, 23–40.

- Sinaga, I. M., Lubis, A., & Prayudi, A. (2020). Pengaruh Internet Financial Reporting (Ifr) Dan Tingkat Pengungkapan Informasi Website Terhadap Frekuensi Perdagangan Saham Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis (Jimbi)*, 1(2), 106–111. <https://doi.org/10.31289/Jimbi.V1i2.394>
- Smulowitz, S., Becerra, M., & Mayo, M. (2019). Racial Diversity And Its Asymmetry Within And Across Hierarchical Levels: The Effects On Financial Performance. *Human Relations*, 72(10), 1671–1696. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Sofyani, H., & Dwirama, V. (2020). Determinan Praktik Internet Reporting Oleh Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 17(2), 158–168. <https://doi.org/10.30595/Kompartemen.V17i2.5855>
- Sophi Dezalinda, & Afriyenti, M. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah Dan Kompleksitas Pemerintahan Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website. *Jurnal Buana Akuntansi*, 8(1), 79–89. <https://doi.org/10.36805/Akuntansi.V8i1.4757>
- Susiyah, H. Y., Afifudin, & Mawardi, M. C. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Di Website Pemda (Studi Emperis Pada Pemerintah Daerah Semalang Raya Periode 2013-2015) Oleh. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang*, 2(1), 15–31.
- Trisnawati, M. D., & Achmad, K. (N.D.). Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. 7823–7830.
- Ulya, C., & Astuti, E. B. (2020). Analisis Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kab Tegal, Bumd Kab Tegal, Ikatan Profesi Notariat Kab Tegal, Camat Dan Lurah Kab Tegal). *Akses: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 63–79. <https://doi.org/10.31942/Akses.V13i2.3242>
- Winangsih, A., & Fathah, R. N. (2023). Faktor Yang Mempengaruhi Internet Financial Reporting Pada Website Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(8), 3299–3309.
- Abdullah, M. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Sleman Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

- Asteria, B. (2015). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Manajemen*, 51 - 61.
- Ekrak Puji Lestari, S. N. (2020). Determinan Transparansi Informasi Keuangan Pada Laman Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia Tahun 2016-2018. *Diponegoro Journal Of Accounting* , 1-13.
- Mardiatmoko, G. (2020). Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda (Studi Kasus Penyusunan Persamaan Allometrik Kenari Muda | *Canarium Indicum L.*). *Barekeng: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 333-342.
- Mukhlisin, W. U. (2020). Peningkatan Efektivitas Kerja Melalui Komitmen Organisasi, Perubahan Organisasi Dan Budaya Organisasi Di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Ciptakarya Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Mitra Manajemen*, 595-606.
- Sugiyono, S. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Yunita, E. A. (2021). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Publikasi Informasi Keuangan Pada Website Resmi Pemerintah Daerah Se-Jawa Tengah. *Dialektika: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 44 – 54.
- Hanafi, M., & Wadi, I. (2021). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Kinerja keuangan Terhadap Internet Financial Reporting Dan Opini Audit Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Bagian Tengah. *Akuntansi Dan Keuangan Syariah*, 6(1), 34–44. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JDAB/index>
- Hanifah, F. F., Suryarini, T., & Hasan Mukibad. (2017). Pengaruh Kompetensi Politik, Ipm, Dan Leverage Terhadap Ketersediaan Dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah Pada Website. *Simposium Nasional Akuntansi XX*, 1–23.
- Lestari, E. P., & Rahardjo, S. N. (2020). *Diponegoro Journal Of Accounting* <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>. 9(56), 1–13.
- Makmum, & Rahayu, S. (2018). Pengaruh Opini Audit, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Keuangan Dan Non Keuangan Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah. *Tjybjb.Ac.Cn*, 27(2), 635–637.
- Oktavia, W. T., & Aliyah, S. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah. *Among Makarti*, 15(2), 215–232. <https://doi.org/10.52353/ama.v15i2.322>
- Purwanti, D., & Tubels, A. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website (Analysis of Factors

that Affect Transparency of Information Finance Regions Via Website). *Simposium Nasional Akuntansi XIX Lampung*, 1(6), 1–26.

Sophi Dezalinda, & Afriyenti, M. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah dan Kompleksitas Pemerintahan Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website. *Jurnal Buana Akuntansi*, 8(1), 79–89. <https://doi.org/10.36805/akuntansi.v8i1.4757>

Utami, R. D., Hapsari, D. W., & Mahardika, D. P. K. (2019). Kompetisi Politik, Pendapatan Asli Daerah Dan Opini Audit Terhadap Implementasi E-Government. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 11(1), 16–23. <https://doi.org/10.23969/jrak.v11i1.1698>

